



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk menyatakan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja dari kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan tahun 2026 dan Penetapan Kinerja tahun 2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator sebagai berikut :



Evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.1
Rencana Aksi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026		PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOMES / OUTPUT	KINERJA TAHUN 2026		ANGGARAN [Rp.]	
		Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,01	2,20	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	29	0	1.288.886.060	31.737.735
Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	2,50	58,67	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2	0	546.003.720	0,00
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,23	0,41	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	0	98.500.000	43.187.941
Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	0,32	(17,19)	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	3	0	120.800.000	10.319.216
Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,62	0,34	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3	0	2.036.800.000	49.796.600
Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,02	58,97	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1	0	144.000.000	13.350.000
Meningkatnya Pendapatan Asli	Persentase Realisasi Pencapaian	25,00	41,30	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	0	102.000.000	4.772.600

Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)								
Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,40	0,26	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	0	548.800.000	61.378.300
	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,10	0,73	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	0	342.700.000	4.500.000

Sumber : Bapenda Prov Sumsel (2026)

3.1.1 Capaian Indikator Tujuan

Tujuan

Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

“.....Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.....”

Tujuan Perangkat Daerah dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029 Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dari sisi Pendapatan Daerah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui sebaran kemampuan keuangan daerah digunakan peta Kapasitas Fiskal Daerah yang memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Desentralisasi fiskal dalam era kewenangan otonomi daerah terus dilakukan peningkatan dan inovasi dalam mencari sumber – sumber yang menjadi potensi daerah berdasarkan pengelolaan kewenangan yang diserahkan. Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang bersumber pada kemandirian fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kemandirian kebijakan otonomi daerah yang mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak daerah. Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan local taxing power, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, performance layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Formula Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah:

$$KFD_{Provinsi} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]$$

Dimana:

$KFD_{Provinsi}$	= Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
TKD	= Transfer ke Daerah
PTAD	= Pendapatan Transfer antar Daerah
LLPS	= Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
SiLPA	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
OTSUS	= Dana Otonomi Khusus
DTI	= Dana Tambahan Infrastruktur
DAIS	= Dana Istimewa
BP	= Belanja Pegawai
BBH	= Belanja Bagi Hasil
BB	= Belanja Bunga
PUD	= Pembayaran Utang Daerah

Untuk menghitung indeks kapasitas fiskal daerah, dengan formula:

$$RKFD_{Provinsi-i} = \frac{KFD_{Provinsi-i}}{Belanja Pegawai_{Provinsi-i}}$$

Dimana:

$RKFD_{Provinsi-i}$	= Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
$KFD_{Provinsi-i}$	= Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
BP	= Belanja Pegawai Daerah Provinsi

3.1.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Kinerja kapasitas fiskal Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II tahun 2026 menunjukkan angka peningkatan

Pengukuran data kinerja triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Data Kinerja Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel TW II Tahun 2026

No.	Uraian	Realisasi [Rp.]	KFD	RKFD
[1]	[2]	[3]	[4]	
I	Pendapatan:	4.805.304.799.475,63		
	1. PAD	2.119.766.534.740,43		
	2. TKD	1.473.298.861.188,00		
	3. PTAD	0,00		
	4. LLPS	0,00		
	5. SiLPA	1.212.239.403.547,20		
II	Pengeluaran:	1.980.190.224.815,98		
	1. OTSUS	0,00		
	2. DTI	0,00		
	3. DAIS	0,00		
	4. BP	1.284.001.430.734,00		
	5. BBH	696.188.794.072,98		
	6. BB	0,00		
	7. PUD	0,00		
III	KFD		2.825.114.574.659,65	
IV	RKFD			2,2

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Realisasi kinerja kapasitas fiskal daerah:

$$KFD_{Provinsi} = [4.805.304.799.475,63] - [1.980.190.224.815,98]$$

$$KFD_{Provinsi} = 2.825.114.574.659,65$$

$$RKFD_{Provinsi-i} = \frac{2.825.114.574.659,65}{1.284.001.430.734,00}$$

$$RKFD_{Provinsi-i} = 2,2$$

Apabila dibandingkan dengan target kinerja kapasitas fiskal daerah tahun 2026 yang telah ditentukan sebesar 2,02, maka realisasi Triwulan II tahun 2026 sebesar 2,2 atau tercapai sebesar 107,84 %.

Realisasi indeks kapasitas fiskal daerah pada tahun 2026 sebesar 2,2 hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi pendapatan tercapai realisasi sebesar Rp. 4.805.304.799.475,63 sementara dari sisi pengeluaran belanja pemerintah (*government expenditure*) sebesar Rp. 1.980.190.224.815,98 sehingga kapasitas fiskal daerah diperoleh sebesar Rp. 2.825.114.574.659,65. Kondisi

tahun 2026, sejak tanggal 05 Januari 2025 diberlakukannya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan nilai equivalen sama seperti pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB ini mengatur bahwa perubahan transfer ke Kabupaten/Kota semula dengan pola bagi hasil berubah menjadi *real time payment* ke RKUD Kabupaten/Kota, sehingga pencatatan realisasi dalam akuntansi mengalami penurunan. Dari sisi pengeluaran belanja, kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga menambah pengeluaran belanja pegawai.

3.1.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 serta Capaian Kinerja Pada Triwulan II tahun 2026 Dengan Tahun sebelumnya

Kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami trend fluktuatif ke triwulan II tahun 2026 seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel TW II Tahun 2026 Dengan TW II 2025

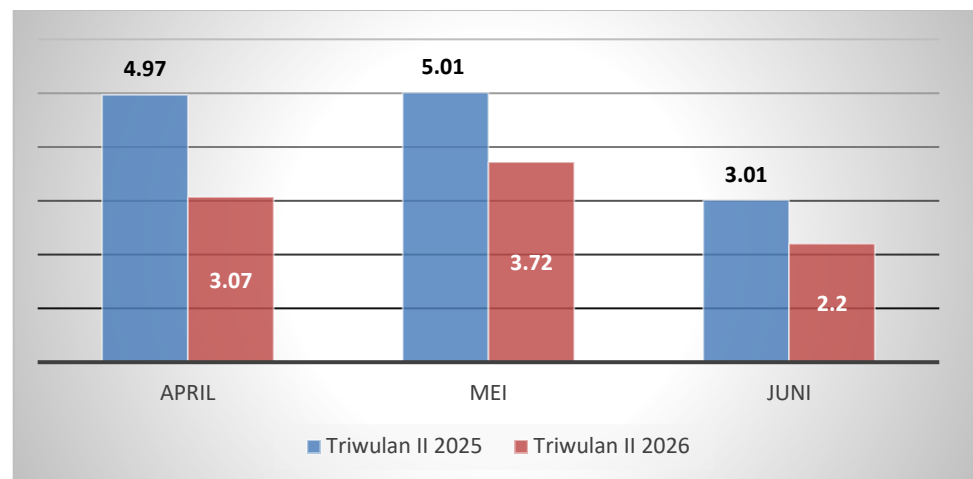
Periodesasi	RKFD		
	April	Mei	Juni
Triwulan II 2025	4,97	5,01	3,01
Triwulan II 2026	3,07	3,72	2,20

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Perkembangan indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami kondisi fluktuatif, namun menunjukkan trend yang terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja kapasitas fiskal dari sisi Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja positif yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja pada peningkatan pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan dengan kinerja positif dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Realisasi kinerja kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II tahun 2026 secara *quarterly-on-quarterly* mengalami penurunan sebesar 0,81 poin walaupun masih tergolong dalam kapasitas sedang.



Gambar 3.1

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Triwulan II Tahun 2025 dengan TW II Tahun 2026

Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel Triwulan II 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan II 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB).

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN

3.1.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Jangka Menengah

Target kinerja kapasitas fiskal daerah yang tertuang dalam dokumen jangka menengah RPJMD tahun 2025 – 2029, dimana pada akhir tahun 2030 indeks kapasitas fiskal daerah sebesar 2,28. Realisasi pada Triwulan II 2026 sebesar 2,2 dengan capaian sebesar 107,84 %.

Tabel 3.4
Target dan Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Triwulan II 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	2,2	2,28	96,49

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Kondisi ketercapaian kinerja indeks kapasitas fiskal daerah tahun 2026 apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 dengan tingkat kemajuan sebesar 96,49 %, yang akan dicapai pada selama tahun 2026 – 2030 menunjukkan kapasitas Fiskal Sumsel di triwulan II sudah memenuhi target.

3.1.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada) Perbandingan data kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (perbandingan 10 Provinsi se Sumatera).

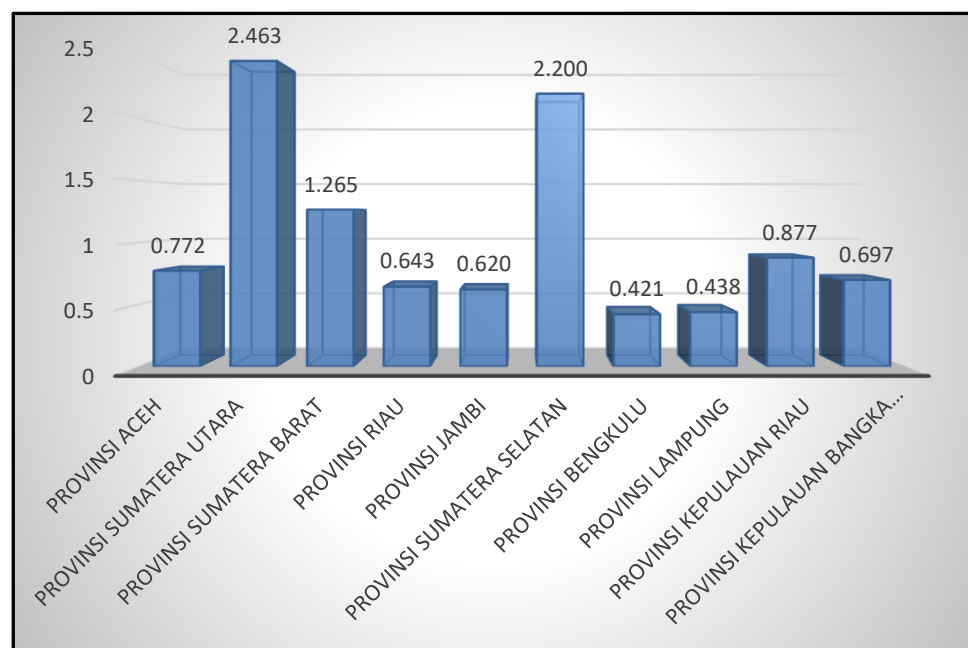
Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel Dengan Standar Nasional

No.	Provinsi Pulau Sumatera	Kinerja TW II Tahun 2026	
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1.	Provinsi Aceh	0,772	Rendah
2.	Provinsi Sumatera Utara	2,463	Tinggi
3.	Provinsi Sumatera Barat	1,265	Sedang
4.	Provinsi Riau	0,643	Rendah

5.	Provinsi Jambi	0,620	Rendah
6.	Provinsi Sumatera Selatan	2,200	Tinggi
7.	Provinsi Bengkulu	0,421	Rendah
8.	Provinsi Lampung	0,438	Rendah
9.	Provinsi Kepulauan Riau	0,877	Rendah
10.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0,697	Rendah

Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan

Data tahun Triwulan II tahun 2026, posisi kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam wilayah Pulau Sumatera berada pada peringkat 2 (dua) tertinggi setelah Provinsi Sumatera Utara. Sementara data realisasi Triwulan II tahun 2026, kinerja kapasitas fiskal daerah pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional
 Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan

Kondisi indeks kapasitas fiskal daerah dengan perbandingan pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera mengindikasikan bahwa indeks kapasitas fiskal daerah tertinggi Triwulan II tahun 2026 pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 2,463, kemudian Provinsi

Sumatera Selatan sebesar 2,200. Indeks kapasitas fiskal daerah terendah pada Provinsi Bengkulu sebesar 0,421, sementara posisi indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan berada pada posisi kedua dengan indeks sebesar 2,200.

3.1.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2026	REALISASI TW II 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,01	2,2	217,82	Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Memfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal	
						Pemberian insentif fiskal Pajak PKB dan Pajak BBN-KB berupa equivalen sama seperti pembayaran pajak pelaksanaan UU 28 tahun 2009	
						Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) bersama dengan OPD terkait antara lain Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja	
						Melakukan pengawasan terhadap pajak daerah berbasis mitigasi risiko	
						Pelaksanaan penagihan pajak daerah secara door to door service	
						Melaksanakan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat secara berkala waktu	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)



Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja indeks kapasitas fiskal daerah dengan strategi:

1. Melaksanakan kegiatan *door to door service* yang merupakan bentuk penagihan pajak bagi wajib pajak dari satuan rumah tangga yang dilaksanakan penagihan;
2. Melaksanakan *updating* basis data pajak daerah untuk mencapai tingkat keakuratan data pajak sehingga dapat dipergunakan dalam menentukan proyeksi pendapatan;
3. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk sosialisasi langsung, penyebaran leaflet, booklet, sosial media serta media lainnya ke masyarakat untuk mematuhi ketentuan bayar pajak sesuai dengan tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan sehingga pembangunan Sumatera Selatan terus berjalan;
4. Melaksanakan sinergi dan kolaborasi dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota pada Opsen PKB dan Opsen BBN-KB sehingga jangkauan layanan pembayaran pajak sampai ke tingkat kelurahan atau pedesaan;
5. Mempercepat proses deregulasi beberapa peraturan yang terkait dengan pajak daerah untuk memastikan kapasitas dan supremasi hukum di bidang perpajakan;
6. Melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Tim Pembina Samsat di tingkat Provinsi untuk memastikan dukungan kinerja dari pihak Kepolisian dan Jasa Raharja;
7. Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuota akses data kependudukan;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;
9. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru.

Tabel 3.7
Faktor Pendukung dan Keberhasilan Kinerja Indeks Kapasitas Fiskal

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,01	2,2	217,82	1.288.886.060	31.737.735	2,58	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> - Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; - Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien - Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> - Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja - Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP - Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi - Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal - Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi - Sosialisasi secara massif terhadap pembayaran pajak daerah cukup signifikan - Program SIGUNTANG MENYAPA telah memberikan dampak yang signifikan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.1.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.8

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TW II TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	1,01	2,2	217,82	1.288.886.060	31.737.735	2,58	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator tujuan belum dihitung pada Triwulan II tahun 2026.

3.1.1.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.9
Perbandingan Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			94,15	0,00	0,00	1.228.886.060,00		2,58	-
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		94,15	0,00	0,00	1.288.886.060	31.737.735,00	2,58	-
		1.10	Penagihan Pajak Daerah				1.288.886.060	31.737.735,00	2,58	-
	JUMLAH						1.288.886.060	31.737.735,00	2,58	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah belum dihitung pada Triwulan II tahun 2026.

3.1.1.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.10
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	217,82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	31,24	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	32,65	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	11,86	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	17,25	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	32,39	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	8,54	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	6,84	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	6,84	Menunjang

				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	11,8	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1,31	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2,44	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	26,16	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	43,85	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	43,06	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8,93	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	2,58	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	0,00	Menunjang

				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	23,24	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.1.8 Analisis Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel 3.11
Analisis Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		218.896.716.092	68.376.201.300	31,24
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.600.000,00	15.153.600,00	6,93
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.000.000,00	0,00	0,00
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	73.000.000,00	0,00	0,00
	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600.000,00	15.153.600,00	20,87
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	163.929.148.028,00	53.523.436.672,00	32,65
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	163.609.908.028	53.454.134.432,00	32,67
	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.240.000,00	0,00	0,00
	2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	120.000.000,00	69.302.240,00	57,75
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.200.000,00	0,00	0,00
	3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.200.000,00	0,00	0,00
	4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	288.400.000,00	34.202.600,00	11,86
	4.1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	102.000.000,00	4.772.600,00	4,68
	4.2	Pengolahan Data Retribusi Daerah	144.000.000,00	13.350.000,00	9,27
	4.3	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	42.400.000,00	16.080.000,00	37,92
	5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	682.800.000,00	117.796.830,00	17,25
	5.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.800.000,00	0,00	0,00
	5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	372.800.000,00	84.450.000,00	22,65
	5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	293.200.000,00	33.346.830,00	11,37
	6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.064.606.580	4.571.619.917,00	22,78
	6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	390.069.080,00	46.426.000,00	11,90
	6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650.000.000,00	391.840.017,00	60,28
	6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	250.000.000,00	246.499.999,00	98,60
	6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.130.337.500,00	634.872.200,00	56,17
	6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.300.000.000,00	2.100.002.376,00	27,27
	6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.000.000,00	13.300.000,00	41,56
	6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.800.000,00	17.372.500,00	17,23
	6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	640.000.000,00	153.502.916,00	23,98
	6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.171.400.000,00	967.803.909,00	10,55

	7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.400.000.000,00	999.990.287,00	71,43
	7.1	Pengadaan Mebel	1.000.000.000,00	999.990.287,00	100,00
	7.2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	400.000.000,00	0,00	0,00
	8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.100.827.402,00	8.628.824.281,00	31,84
	8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.800.000,00	6.300.000,00	17,12
	8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.659.234.198,00	1.179.554.873,00	44,36
	8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.800.000,00	29.100.000,00	14,64
	8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.205.993.204,00	7.413.869.408,00	30,63
	9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.587.134.082,00	485.177.113,00	9,35
	9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	2.107.134.082,00	254.617.728,00	12,08
	9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.430.000.000,00	169.914.385,00	11,88
	9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000,00	60.645.000,00	20,22
	9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.350.000.000,00	0,00	0,00
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		120.800.000,00	10.319.216,00	8,54
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	120.800.000,00	10.319.216,00	8,54
	1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	120.800.000,00	10.319.216,00	8,54
III.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		5.652.489.780,00	386.428.027,00	6,84
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.652.489.780,00	386.428.027,00	6,84
	1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	548.800.000,00	61.378.300,00	11,18
	1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	342.700.000,00	4.500.000,00	1,31
	1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.036.800.000,00	49.796.600,00	2,44
	1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	454.000.000,00	118.750.279,00	26,16
	1.5	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	98.500.000,00	43.187.941,00	43,85
	1.6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	70.000.000,00	30.139.282,00	43,06
	1.7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	546.003.720,00	0,00	0,00
	1.8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	40.000.000,00	3.570.000,00	8,93
	1.9	Penagihan Pajak Daerah	1.422.980.200,00	0,00	0,00
	1.10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00
	1.11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	186.600.000,00	43.367.890,00	23,34
	1.12	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00
	1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	60.200.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH		224.670.005.872,00	68.772.948.543,00	30,61

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.2 Sasaran Strategis 1 (SS.1)

SS.1

Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal

".....*Revenue mobilization* merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah....."

Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah dalam belanja APBD.

Deviasi realisasi pendapatan asli daerah terhadap total anggaran belanja APBD bersumber pada pendanaan PAD dalam batas toleransi yang ditetapkan. Dalam hal ini berdasarkan capaian kinerja lima tahun terakhir (yoy) batas toleransi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Formula perhitungan IKSS.1:

$$y = \left(\frac{\text{Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD (sebelum APBD Perubahan)}} - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

y = Nilai Deviasi

PAD = Realisasi PAD tahun ke n

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (sebelum perubahan)

3.1.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran realisasi data kinerja IKSS.1 Triwulan II tahun 2026:

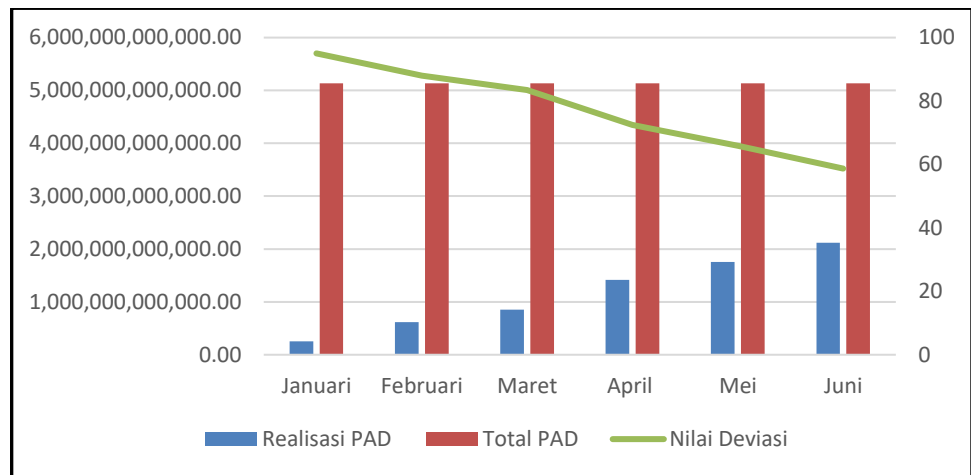
Tabel 3.12
Perhitungan Realisasi Data Kinerja IKSS.1

No.	Bulan	Realisasi PAD	Total PAD	Nilai Deviasi	Target Tahunan 2026
1.	Januari	255.787.714.620,69	5.132.383.462.643,00	95,016	6,00
2.	Februari	615.693.471.321,08	5.132.383.462.643,00	88,004	
3.	Maret	850.245.439.419,81	5.132.383.462.643,00	83,434	
4.	April	1.415.781.762.667,60	5.132.383.462.643,00	72,414	
5.	Mei	1.752.394.354.924,06	5.132.383.462.643,00	65,856	
6.	Juni	2.119.766.534.740,03	5.132.383.462.643,00	58,698	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

$$\text{Capaian kinerja tahun 2026} = \frac{58,698}{6,000} \times 100\% = 978,3 \%$$

Capaian kinerja untuk IKSS.1 triwulan II tahun 2026 mencapai 978,3%, menunjukkan bahwa pendapatan termobilisasi dengan baik, dengan nilai deviasi yang semakin menurun pada trend bulanan.



Gambar 3.3
Grafik Deviasi Realisasi PAD Terhadap PAD dalam APBD TW II 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga terus meningkatnya kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal. Dengan indikatornya untuk mendekatkan pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) pada garis normal yang telah ditentukan sejak perencanaan awal. Efek deviasi yang terjadi, ketika jarak deviasi yang semakin kecil dari kondisi penerimaan pendapatan dari perencanaan awal, maka kondisi nya semakin baik, hal ini mengindikasikan bahwa kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal semakin baik. Kinerja indikator *revenue mobilization* pada Triwulan II tahun 2026 dengan realisasi sebesar 58,698 menggambarkan kondisi bahwa kondisi sementara kredibilitas atas kepercayaan pendapatan asli daerah.

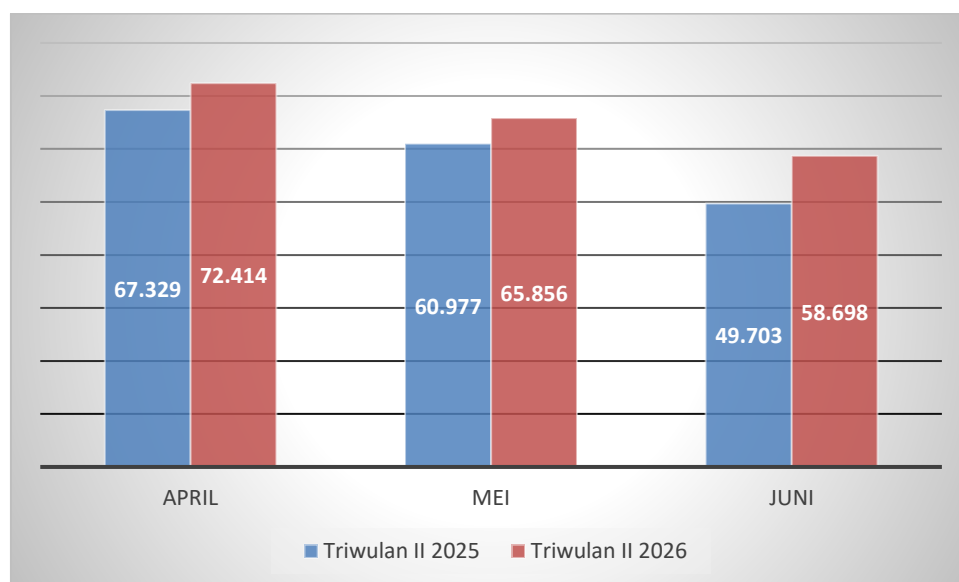
- 3.1.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II tahun 2026 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan II tahun 2025
- Realisasi kinerja IKSS.1 Triwulan II tahun 2026 mencapai 58,698 dimana

Tabel 3.13

Perhitungan Realisasi Data Kinerja IKSS.1 TW II 2026 dengan TW II 2025

Periodesasi	Nilai Deviasi		
	April	Mei	Juni
Triwulan II 2025	67,329	60,977	49,703
Triwulan II 2026	72,414	65,856	58,698

Perbandingan realisasi kinerja IKSS.1 Triwulan II tahun 2026 sebesar 58,698 % mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 49,703 % atau naik sebesar 9,27 %, hal ini menunjukkan kinerja yang belum baik dari Triwulan II tahun 2025 (makin menjauh dari garis normal).

**Gambar 3.4**

Grafik Perbandingan Deviasi Realisasi PAD TW II 2025 Dengan TW II Tahun 2026

Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Salah Satu penyebab mengapa pendapatan Triwulan II 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan II 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption* mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB

mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swasta melakukan penghematan energi (BBKB). Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN.

3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja IKSS.1 Triwulan II tahun 2026 sebesar 58,698 dan terhadap target jangka menengah yang tertuang di dalam dokumen RPJMD 2025 – 2029, dimana pada akhir tahun 2030 target kinerja IKSS.1 ini sebesar 8,51. Terhadap target jangka menengah bahwa capaian kinerja tahun 2026 telah mencapai 689,74 %.

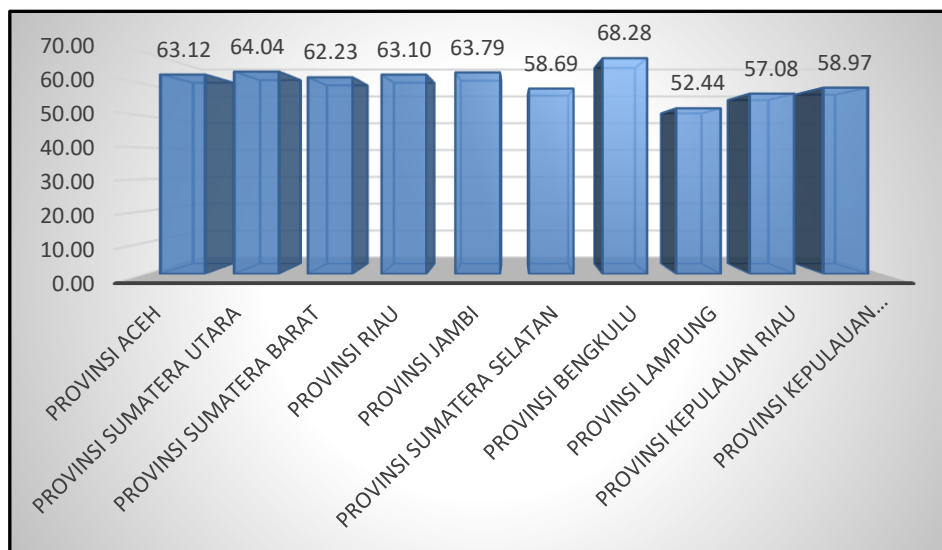
Tabel 3.14
Perhitungan Capaian Data Kinerja IKSS 1 Terhadap Target Realisasi

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW II 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	58,697	8,51	689,74

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Kinerja indikator *revenue mobilization* pada Triwulan II ini, apabila dibandingkan dengan target yang tertuang di dalam Renstra tahun 2025 – 2029 mencapai tingkat kemajuan 689,74 %, kondisi ini harus dikendalikan untuk tetap terjaga pada garis normal yang diharapkan sehingga deviasi yang diharapkan semakin rendah untuk meningkatkan kredibilitas pendapatan asli daerah pada kondisi perencanaan awal

3.1.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Apabila dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, maka Provinsi Sumatera Selatan berada pada posisi:



Gambar 3.5
Grafik Perbandingan Deviasi Realisasi PAD 2026 dengan Standar Nasional
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Nilai deviasi terendah pada Provinsi Lampung sebesar 52,44 dan nilai deviasi tertinggi pada Provinsi Bengkulu dengan nilai deviasi sebesar 68,28. Kondisi kredibilitas *revenue mobilization* pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera mengalami kontraksi atau deviasi yang menjauh dari garis normal karena perubahan regulasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022. Dimana pencatatan realisasi pendapatan bagi hasil pajak PKB dan pajak BBN-KB ke Kabupaten/Kota tidak lagi dicatat pada akun Pemerintah Provinsi dan langsung diterima oleh rekening RKUD Kabupaten/Kota secara real time payment pada saat wajib pajak membayar pajak.

3.1.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.15
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 1 serta Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2026	REALISASI TW I 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	2,5	58,698	2347,92	Sinergi dan kolaborasi bersama OPD pemungut retribusi dalam menggali potensi PAD dari sektor Retribusi	
						Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuota akses data kependudukan	
						Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga	
						Pembentukan Satgas OPAD PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan	
						Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
						Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja indikator *revenue mobilization* sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern;
2. Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel;
3. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan;
4. Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
5. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
6. Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasive;
7. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
8. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Tabel 3.16
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 1 serta Faktor Pendukung

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TW II TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	2,5	58,698	2347,92	546.003.720	0,00	0,00	Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90% 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin 3. Pelaksanaan operasi gabungan dengan pihak Kepolisian, Dishub dan Sat Pol PP berjalan cukup efektif 4. Koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan Kementerian ESDM terkait dengan dana bagi hasil Migas 5. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari sisi pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah 6. Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.2.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.17

Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 1 dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TW I TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	2,5	58,698	2374,92	546.003.720,00	0,00	0,00	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*) pada Triwulan II tahun 2026 belum dapat dihitung.

3.1.2.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.18
Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 1 dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			94,15	0,00	0,00	546.003.720,00	0,00	0,00	-
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		94,15	0,00	0,00	546.003.720,00	0,00	0,00	-
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				546.003.720,00	0,00	0,00	
	JUMLAH						546.003.720,00	0,00	0,00	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Triwulan II tahun 2026 belum dihitung.

3.1.2.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.19
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja IKSS 1

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	2347,92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	10,61	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	2,88	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	0,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	32,39	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1,82	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,83	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	1,83	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4,87	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	0,00	Menunjang

				Daerah			
				Penyuluhan Penyebarluasan Pajak Daerah dan Kebijakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,82	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.3 Sasaran Strategis 2 (SS.2)

SS.2

Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah

".....Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, revaluasi atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.

Seiring dengan mandatory Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah agar mempunyai desentralisasi fiskal yang semakin kuat, Pemerintah Pusat melalui perimbangan keuangan mulai mengurangi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk menilai kemampuan kinerja pembiayaan daerah dalam membiayai pembangunan di tingkat daerah. Peran pemerintah daerah yang diserahkan dalam mengelola dan mengatur keuangan dengan reformasi di bidang keuangan adalah diharapkan membuat pemerintah lebih independen melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan *local taxing power*, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, *performance* layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Perpajakan menghasilkan negara yang lebih

representatif dan akuntabel, karena ekstraksi pendapatan menciptakan kontrak sosial fiskal antara negara dan warga negara, dimana pemerintah cenderung melakukan tawar-menawar dengan pembayar pajak, bertukar perwakilan dan layanan untuk meningkatkan perpajakan.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang mandiri menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan dan pembiayaan di daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan desentralisasi fiskal daerah. Salah satu faktor pendukung yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah perluasan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kekuatan sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Formula Perhitungan IKSS.2:

$$IKF = 1 - \left(\frac{Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH} \right)$$

Dimana:

IKF = Indeks Kemandirian Fiskal

Tr_{GP} = *General Purpose Transfer* (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)

Tr_{SP} = Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)

B = *Subnational Borrowing* (Penerimaan Pinjaman Daerah)

REVSH = Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Kehutanan

REV_{OR} = Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1 = Nilai Invers

3.1.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2026

Pengukuran data kinerja:

Tabel 3.20

Pengukuran Realisasi Data Kinerja Indeks Kemandirian Fiskal Triwulan II Tahun 2026

No.	Uraian		Realisasi [Rp.]
[1]	[2]		[3]
I	Pembilang:		
	1	Tr _{GP}	708.046.321.600,00
	2	Tr _{SP}	530.341.240.638,00
	3	B	0,00
	4	REVSH	234.911.298.950,00
	Sub Total I		1.473.298.861.188,00
II	Penyebut:		
	1	REV _{OR}	2.119.766.534.740,43
	2	Tr _{GP}	708.046.321.600,00
	3	Tr _{SP}	530.341.240.638,00
	4	B	0,00
	5	REVSH	234.911.298.950,00
	Sub Total II		3.593.065.395.928,43

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

$$\text{Capaian 2025: IKF} = 1 - \left(\frac{1.473.298.861.188,00}{3.593.065.395.928,43} \right) = 0,590$$

Capaian indeks kemandirian fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 sebesar 128,83 % yang mengindikasikan bahwa pada Triwulan II ini Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah otonom dengan kategori mandiri karena diatas 50% . Dalam membiayai pembangunan untuk Triwulan II di Sumatera Selatan tidak mempunyai ketergantungan dengan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

$$\text{Terhadap target tahun 2026, nilai IKF} = \frac{0,590}{0,458} \times 100 \% = 128,83\%$$

3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2026 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan II tahun 2025

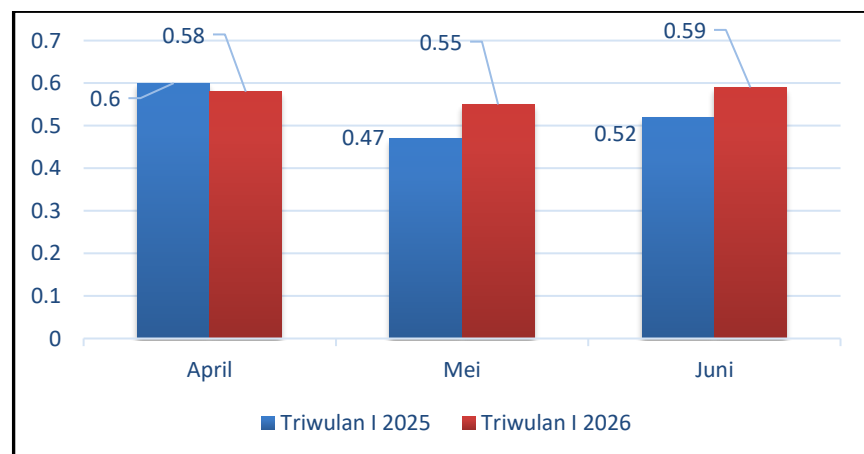
Nilai realisasi capaian kinerja IKSS.2 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya selama kurun waktu 16 (enam belas) tahun, posisi indeks kemandirian fiskal Sumatera Selatan mengalami fluktuatif antara mandiri dan menuju mandiri.

Tabel 3.21

Pengukuran Realisasi IKSS 2 TW II Tahun 2026 serta Capaian Kinerja TW II Tahun 2026

Periodesasi	Indeks Kemandirian Fiskal		
	April	Mei	Juni
Triwulan II 2025	0,60	0,47	0,52
Triwulan II 2026	0,58	0,55	0,59

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026



Gambar 3.6

Grafik Perbandingan Indeks Kemandirian Fiskal TW II 2026 dengan TW II 2025

Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Trend tertinggi kemandirian fiskal Sumatera Selatan terjadi pada Bulan Juni tahun 2026 dengan nilai IKF sebesar 0,59 dan terendah terjadi pada Bulan Mei tahun 2026 dengan nilai IKF sebesar 0,55.

Salah Satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan pada TW II 2026 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB).

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN.

3.1.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja kemandirian fiskal Sumatera Selatan triwulan II tahun 2026 apabila dibandingkan dengan rencana target yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030:

Tabel 3.22

Realisasi Kinerja Kemandirian Fiskal Sumsel Triwulan II Tahun 2026 dan Target RPJMD

No.	Uraian	Kemandirian Fiskal		Capaian Kinerja
		Realisasi TW II 2026	Target RPJMD 2030	
1.	IKF	0,59	0,520	113,46 %
2.	Pendapatan	3.593.065.395.928,43	13.549.281.593.204,80	0,520
3.	TKD	1.473.298.861.188,00	6.468.639.847.802,56	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Capaian realisasi kinerja kemandirian fiskal Sumatera Selatan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan rencana target dalam RPJMD tahun 2025-2029, dimana pada tahun 2030 telah mencapai 113,46 %.

Capaian kinerja realisasi indeks kemandirian fiskal daerah tahun 2026 sudah sesuai (*on the track*) untuk mencapai target optimis akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 serta akhir periode Renstra tahun 2025 – 2029 dimana Triwulan II tahun 2026 ini sudah mencapai sebesar 128,83 %

Tabel 3.23

Capaian Kinerja Realisasi Indeks Kemandirian Fiskal Sumsel Triwulan II Tahun 2026

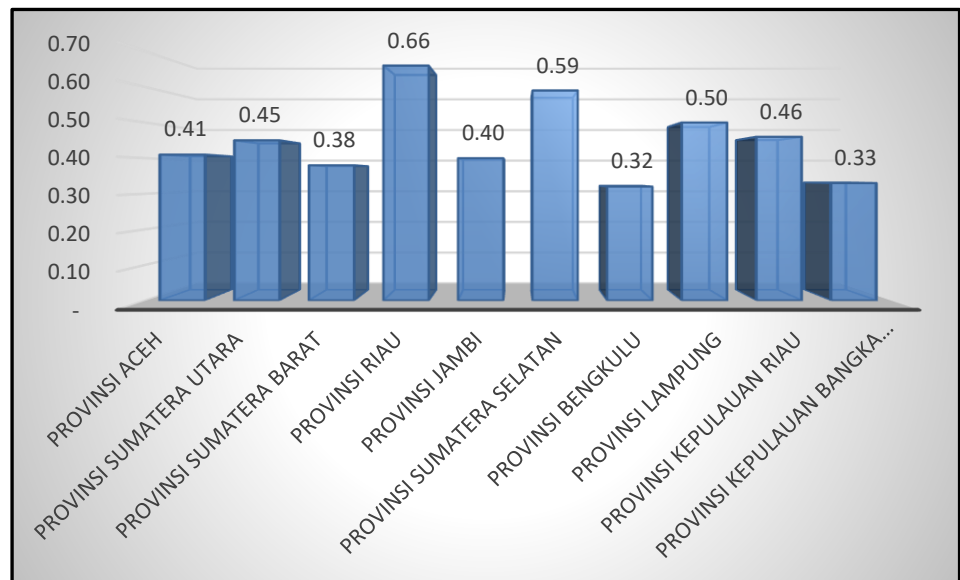
No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW II 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,590	0,520	113,46 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Tingkat kemajuan indeks kemandirian fiskal daerah pada Triwulan II tahun 2026 telah mencapai 113,46 % hal ini mengindikasikan bahwa strategi yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang ada.

3.1.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Kemandirian fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan apabila dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, maka akan memberikan gambaran sebagai berikut:



Gambar 3.7

Grafik Perbandingan Indeks Kemandirian Fiskal dengan Standar Nasional
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Provinsi dengan nilai IKF tertinggi pada Provinsi Riau sebesar 0,66 dengan kategori mandiri sementara nilai IKF terendah pada Provinsi Bengkulu dengan nilai IKF 0,32 dengan kategori belum mandiri. Posisi Provinsi Sumatera Selatan pada urutan pertama dengan nilai IKF 0,59 dengan kategori daerah sudah mandiri kemandirian fiskal.

3.1.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.24
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 2 serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2026	REALISASI TW II 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,23	0,590	256,52	Memperkuat basis data pajak daerah dengan potensi kemampuan daerah	
						Meningkatkan intensifikasi pajak daerah dengan program peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah	
						Memperluas ekstensifikasi pajak daerah dengan peningkatan pendaftaran wajib pajak baru untuk memberikan stimulus peningkatan investasi daerah	
						Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan	
						Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor	
						Konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat secara berkala waktu	
						Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah	
						Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks kemandirian fiskal daerah, antara lain:

1. Melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak daerah, bersama dengan pihak Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dengan razia;
2. Memberikan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap;
4. Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah;
5. Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data;
6. Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan;
7. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;
9. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
10. Terus melaksanakan program ekstensifikasi pajak daerah atau memperluas pendaftaran objek pajak daerah melalui peran investasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.



Tabel 3.25
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 2 serta Faktor Pendukung

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN TW II 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,23	0,590	256,52	98.500.000	43.187.941	43,85	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> - Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; - Tagging pendanaan pembangunan melalui PAD pada APBD telah tepat sasaran <u>Faktor Pendukung:</u> - Memberikan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan - Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan - Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data - Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern - Pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko untuk kendali kecurangan terhadap kebocoran penerimaan pajak daerah - Meningkatkan intensifikasi, memperluas ekstensifikasi serta diversifikasi pajak daerah - Memperluas akses keuangan pembayaran pajak daerah melalui platform digitalisasi untuk inklusi keuangan yang lebih baik

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.3.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.26

Perbandingan Pencapaian IKSS 2 dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TW II TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	0,23	0,590	256,52	98.500.000	43.187.941	43,85	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Indeks Kemandirian Fiskal Daerah pada Triwulan II tahun 2026 belum dihitung.

3.1.3.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.27
Perbandingan Pencapaian IKSS 2 dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			94,46	86,71	91,79	120.800.000,00	10.319.216,00	8,54	-
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		94,46	86,71	91,79	120.800.000,00	10.319.216,00	8,54	-
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				120.800.000,00	10.319.216,00	8,54	
II.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			94,15	0,00	0,00	98.500.000,00	43.187.941,00	43,85	-
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		94,15	0,00	0,00	98.500.000,00	43.187.941,00	43,85	-
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				98.500.000,00	21.691.590,00	43,85	
	JUMLAH						219.300.000,00	53.507.157,00	52,39	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Triwulan II tahun 2026 belum dihitung.

3.1.3.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.28
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan IKSS 2

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	256,52	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	31,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	11,86	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	32,39	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	8,54	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	6,84	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	11,8	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1,31	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2,44	Menunjang

				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	26,16	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	43,85	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	43,06	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8,93	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	2,58	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	0,00	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.4 Sasaran Strategis 3 (SS.3)

SS.3

Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

".....Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah"

Mencermati perkembangan dinamika yang ada saat ini, maka perencanaan pembangunan daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang bersumber pada kemampuan fiskal daerah melalui sumber – sumber pendapatan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah (*government expenditure*) dalam bentuk belanja program, kegiatan serta sub kegiatan merupakan semua kewajiban entitas Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Belanja program, kegiatan serta sub kegiatan tersebut disusun berdasarkan skala prioritas daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran (*budget constraint*), misalnya belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan makroekonomi merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk memberikan stimulus terhadap permintaan agregat dengan mengendalikan penerimaan pajak daerah dan intervensi belanja daerah (*government expenditure*). Ketika konsumsi belanja daerah dinaikan dan/atau tarif pajak daerah diturunkan, maka akan terjadi *multiplier effect* dari pemerintah ke sektor swasta dalam bentuk investasi yang berdampak pada permintaan akan barang dan jasa serta modal akan mengalami kenaikan, jika hal ini tidak diikuti dengan keseimbangan penawaran akan menyebabkan terjadinya inflasi

Formula Perhitungan IKSS.3

$$y = \left(\frac{[Pendapatan\ tahun\ n - Pendapatan\ tahun\ (n - 1)]}{Pendapatan\ tahun\ (n - 1)} \right) \times 100\ %$$

Dimana:

y = Pertumbuhan Pendapatan dalam APBD

Pendapatan n = Realisasi Pendapatan tahun berjalan

Pendapatan (n-1) = Realisasi Pendapatan tahun sebelumnya

3.1.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026. Pengukuran data kinerja Triwulan II tahun 2026 :

Tabel 3.29
Pengukuran Data Kinerja IKSS 3 TW II Tahun 2026

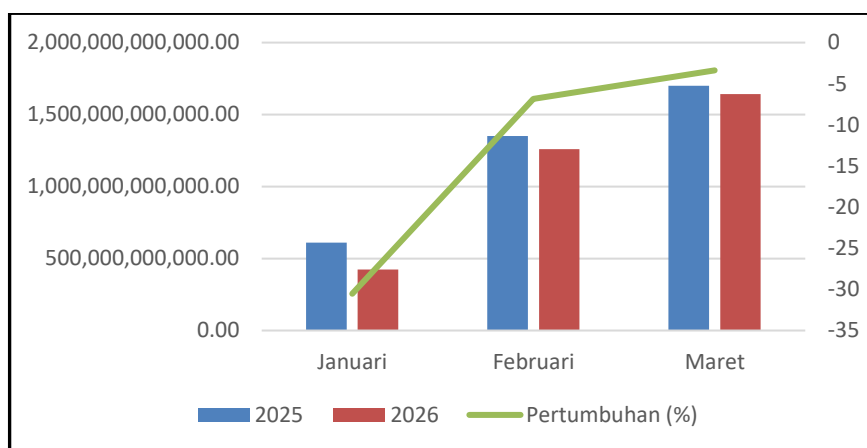
No.	Bulan	Realisasi Pendapatan [Rp.]		Pertumbuhan (%)	Target Tahunan 2026
		2025	2026		
1.	Januari	610.363.668.637,67	424.031.881.720,69	(30,528)	1,28
2.	Februari	1.351.055.896.145,99	1.258.765.484.321,08	(6,831)	
3.	Maret	1.699.323.823.000,50	1.641.969.352.535,81	(3,375)	
4.	April	3.082.180.160.422,22	2.438.696.405.405,60	(20,878)	
5.	Mei	3.736.168.857.076,74	3.211.026.293.912,06	(14,056)	
6.	Juni	4.338.860.285.073,79	3.593.065.395.928,43	(17,189)	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel(2026)

Capaian kinerja IKSS.3 Triwulan II tahun 2026 secara *quarterly-on-quarterly* mengalami pertumbuhan negatif sebesar (17,189%), maupun secara *month-to-month*.

Terhadap target tahun 2026 sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029, capaian sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{(17,189)}{1,28} \times 100\% = (1342,89\%)$$



Gambar 3.8

Grafik Pertumbuhan Pendapatan daerah Terhadap PAD dalam APBD TW I 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Pertumbuhan pendapatan Triwulan II tahun 2026 mengalami pertumbuhan atau kontraksi negatif sebesar (17,189 %), hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB yang mulai diberlakukan sejak tanggal 05 Januari 2025. Namun melihat kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah karena perlambatan struktur ekonomi daerah, kebijakan ini di samakan dengan equivalen yang berarti tidak ada pembebanan masyarakat dalam membayar kewajiban pajak daerah.

3.1.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Dengan Triwulan II 2025

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan dalam APBD (IKSS.3) Triwulan II tahun 2026 apabila dibandingkan pada tahun Triwulan II tahun 2025 tergambar pada kinerja sebagai berikut:

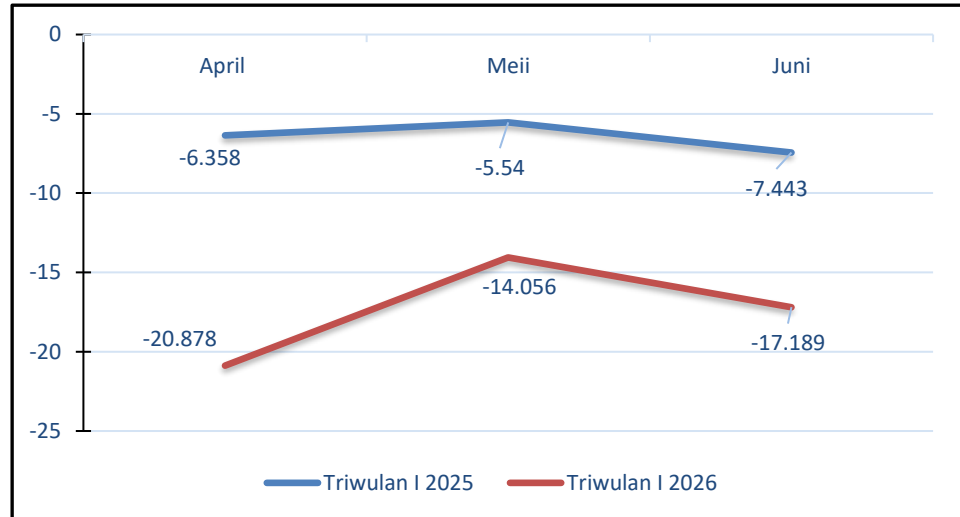
Tabel 3.30

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 TW II 2026 dengan TW II Tahun 2025

Periodesasi	Pertumbuhan Pendapatan dalam APBD		
	April	Mei	Juni
Triwulan II 2025	(6,358)	(5,540)	(7,443)
Triwulan II 2026	(20,878)	(14,056)	(17,189)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel (2026)

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II tahun 2026 mengalami kontraksi pertumbuhan negatif sebesar (17,189 %) dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2025 menurun sebesar 9,746 %.



Gambar 3.9

Grafik Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Sumsel TW II 2026 dengan TW II 2025
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Salah Satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan pada TW II 2026 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB).

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN.

3.1.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan (IKSS.3) Triwulan II tahun 2026 terhadap rencana target RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030 sebagai berikut:

Tabel 3.31

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 Triwulan II Tahun 2026 Terhadap Target RPJMD

No.	Tahun	Pendapatan Daerah		Pertumbuhan (%)
		Realisasi	Target RPJMD 2030	
1.	2025	4.338.860.285.073,79		(17,189)
2.	2026	3.593.065.395.928,43		
dst				
3.	2029		12.731.101.473.657,10	6,427
4.	2030		13.549.281.593.204,80	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel (2026)

Capaian realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan daerah Triwulan II tahun 2026, apabila dibandingkan dengan rencana target RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{[(17,189)]}{6,427} \times 100\% = (267,32)$$

Tabel 3.32

Capaian Realisasi Kinerja IKSS 3 Triwulan II Tahun 2026 Terhadap Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW II 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	(17,189)	1,48	(1161,41)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Kondisi realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kontraksi negatif, sehingga tingkat kemajuan dari periode akhir RPJMD tahun 2025 – 2029 dan periode akhir Renstra tahun 2025 – 2029 masih mengalami tingkat kemajuan yang negatif sebesar (1161,41) %, hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 dengan pemberlakuan Opsen PKB

dan Opsen BBN-KB yang menyebabkan penurunan pendapatan daerah.

3.1.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan daerah pada 10 (sepuluh) daerah provinsi di Pulau Sumatera Selatan memberikan gambaran bahwa perbandingan pertumbuhan sebagai berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 Triwulan II Tahun 2026 Terhadap Standar Nasional

No.	Provinsi	Pendapatan Daerah		Pertumbuhan (%)
		Triwulan II 2025	Triwulan II 2026	
1.	Aceh	4.235.189.410.879,00	3.415.600.120.360,02	(19,35)
2.	Sumatera Utara	4.730.918.017.107,70	5.193.945.906.120,60	9,79
3.	Sumatera Barat	2.951.596.375.583,80	3.374.644.200.687,80	14,33
4.	Riau	3.793.284.331.342,10	2.972.276.010.100,60	(21,64)
5.	Jambi	1.825.395.523.703,60	1.096.583.434.174,90	(39,93)
6.	Sumatera Selatan	4.338.860.285.073,79	3.593.065.395.928,43	(17,18)
7.	Bengkulu	1.188.521.075.691,00	910.662.918.773,68	(23,37)
8.	Lampung	2.692.828.419.308,00	2.365.666.541.706,50	(12,14)
9.	Kepulauan Riau	1.711.031.695.886,40	1.576.845.889.350,50	(7,84)
10.	Kepulauan Bangka Belitung	1.096.774.360.373,70	806.993.698.071,51	(26,42)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu (2026)

Melihat trend pertumbuhan pendapatan daerah secara *quarterly-on-quarterly* wilayah provinsi di Pulau Sumatera mengalami kontraksi pertumbuhan pendapatan negatif, dimana deviasi pertumbuhan negatif terendah berada pada Provinsi Jambi sebesar (39,93 %) sementara pertumbuhan positif tertinggi berada pada Provinsi Sumatera Barat 14,33 %.

3.1.4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.34
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 3 Triwulan II Tahun 2026

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2026	REALISASI TW II 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	0,64	(17,189)	(2.685,78)	Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB	Penyesuaian dan harmonisasi kebijakan UU 1/2022 kedalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2023
						Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota	Sinergi dan kolaborasi pendanaan dan kegiatan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
						Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota	Menyesuaikan dengan pencatatan akuntansi di SIPD
						Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan	Terus berupaya melakukan sosialisasi kebijakan pajak daerah secara massif
						Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi	Memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif untuk menstimulus pertumbuhan investasi di Sumatera Selatan
						Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah	Meningkatkan kinerja makroekonomi mendukung PSN untuk mendapatkan umpan balik berupa pemberian Dana Insentif Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)



Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
2. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
3. Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia, mempercepat proses layanan;
5. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut retribusi;
6. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
7. Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
8. Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.

Tabel 3.35
Faktor Penghambat dan Pendorong IKSS 3 Triwulan II Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TW II TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	0,64	(17,189)	(2.685,78)	120.800.000	10.319.216	8,54	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Perubahan rencana kerja memastikan ketercapaian kinerja dengan dukungan anggaran <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB 2. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota 3. Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota 4. Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan 5. Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi 6. Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.4.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.4.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.36
Perbandingan Pencapaian kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	0,64	(17,189)	(2.685,78)	120.800.000,00	10.319.216,00	8,54	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.4.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.37
Perbandingan Pencapaian kinerja dan Anggaran IKSS 3 Terhadap Program kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		94,46	0,00	0,00	120.800.000,00	10.319.216,00	8,54	-
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	94,46	0,00	0,00	120.800.000,00	10.319.216,00	8,54	-
	1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				10.319.216,00	10.319.216,00	8,54	
	JUMLAH					120.800.000,00	10.319.216,00	8,54	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.4.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.38
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 3 Triwulan II Tahun 2026

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	(2.685,78)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	31,24	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	32,65	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	11,86	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	8,54	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	11,8	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1,31	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2,44	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak	26,16	Menunjang

					Daerah		
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	43,85	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	43,06	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8,93	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	2,58	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	23,24	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.5 Sasaran Strategis 4 (SS.4)

SS.4

Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

".....Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (local tax ratio) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi....."

Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota. PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah).

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Dimana Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan akuntabel. PAD memegang peranan yang sangat penting dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula

tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

IKSS.4

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Formula Perhitungan IKSS.4:

$$IKSS.4 = \frac{\sum_{k=18}^{i=1} (Pajak Daerah Provinsi + Pajak Daerah Kabupaten/Kota)}{Total PDRB} \times 100 \%$$

Dimana:

Pajak Daerah = Total Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Non Migas

3.1.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026. Pengukuran data kinerja dengan perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKSS.4 Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.39

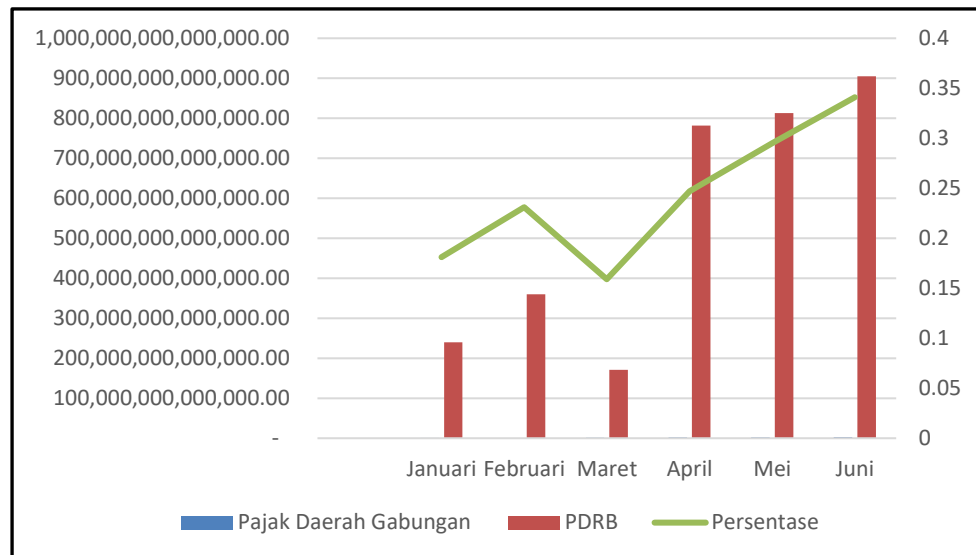
Pengukuran Data Kinerja dengan Perbandingan Antara target dan Realisasi IKSS.4 Triwulan II Tahun 2026

No.	Bulan	Uraian Tahun 2025		Persentase (%)	Target Tahunan 2026
		Pajak Daerah Gabungan Pemerintah Daerah	PDRB		
1.	Januari	434.647.394.819,74	240.068.406.666.667,00	0,181	1,25
2.	Februari	832.738.532.093,38	360.102.610.000.000,00	0,231	
3.	Maret	1.328.994.487.798,91	170.808.447.800.000,00	0,159	
4.	April	1.929.009.587.112,48	781.912.303.333.333,00	0,247	
5.	Mei	2.401.121.283.278,54	812.765.845.000.000,00	0,295	
6.	Juni	3.086.435.794.110,80	905.326.470.000.000,00	0,341	

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2026)

Realisasi capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB Triwulan II tahun 2026 sebesar 0,341%

Capaian terhadap target tahun 2026 = $\frac{0,341}{1,25} \times 100 \% = 27,28 \%$.



Gambar 3.10
Grafik Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PDRB Triwulan II 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB tahun 2026, sebesar 0,159 atau mencapai 12,72 %. Secara total pajak daerah provinsi mengalami penurunan sementara pajak daerah kabupaten/kota mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa ada porsi yang lebih besar bagi hasil ke kabupaten/kota melalui Opsen PKB dan Opsen BBN-KB sebesar 66 % dari pokok pajak PKB dan BBN-KB.

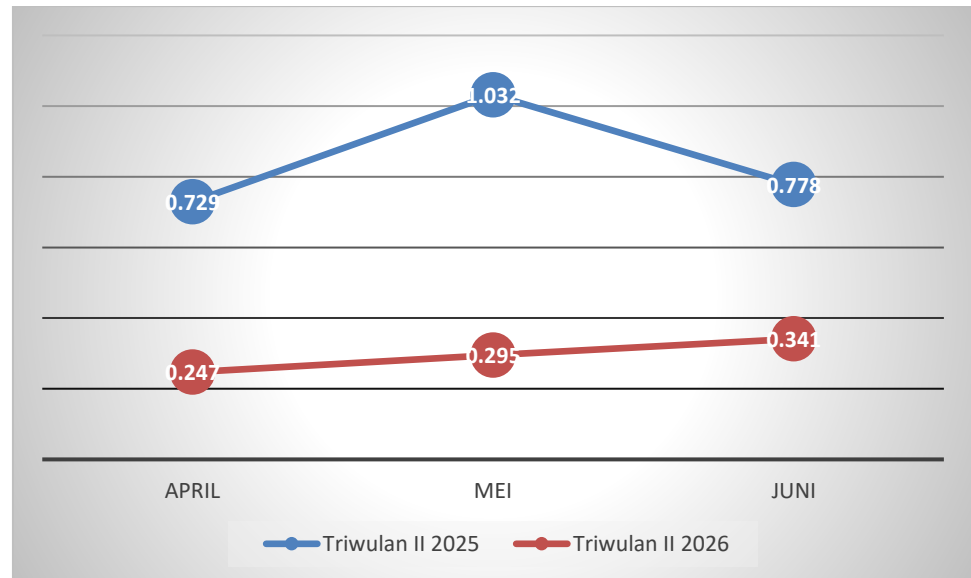
3.1.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan II tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB selama sebagai berikut:

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Triwulan II Tahun 2026 Dengan Triwulan II Tahun 2025

Periodesasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
	April	Mei	Juni
Triwulan II 2025	0,729	1,032	0,778
Triwulan II 2026	0,247	0,295	0,341

Realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB tertinggi terjadi pada Bulan Juni tahun 2026 sebesar Rasio 0,341 dan terendah terjadi pada Bulan April tahun 2026 Rasio 0,247.



Gambar 3.11

Grafik Perbandingan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB TW II Tahun 2026 dengan TW II Tahun 2025
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel Triwulan II 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan II 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca

konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB), dan hal ini pun berpengaruh ke penerimaan PDRB.

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN.

- 3.1.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
- Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.41

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 TW II Tahun 2026 Terhadap Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Triwulan II 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,341	1,27	26,85

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2026)

Capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 telah mengalami tingkat kemajuan sebesar 26,85 %.

Perkembangan penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun total penerimaan pajak daerah oleh 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota pada periode tahun 2010 – 2025 menunjukan

perkembangan peningkatan yang signifikan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah mengindikasikan bahwa basis data pajak yang semakin kuat, sinergi dan kolaborasi antar pemerintahan untuk menggali potensi pajak daerah yang semakin baik serta pola pengembangan ekstensifikasi pajak daerah yang semakin baik untuk meningkatkan ruang kebijakan investasi yang semakin baik.

3.1.5.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.42

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Uraian Realisasi Triwulan II Tahun 2026		Persentase (%)
		Pajak Daerah Gabungan Pemerintah Daerah	PDRB	
1.	Aceh	0,00	66.390.920.000.000,00	0,00
2.	Sumatera Utara	5.151.637.128.646,00	320.029.180.000.000,00	1,610
3.	Sumatera Barat	1.634.400.230.780,60	92.962.820.000.000,00	1,758
4.	Riau	3.490.064.739.605,90	317.136.360.000.000,00	1,100
5.	Jambi	1.009.916.332.719,50	88.803.210.000.000,00	1,137
6.	Sumatera Selatan	3.086.435.794.110,80	905.326.470.000.000,00	0,341
7.	Bengkulu	525.664.905.953,88	28.636.840.000.000,00	1,836
8.	Lampung	2.561.328.505.421,40	132.361.940.000.000,00	1.935
9.	Kepulauan Riau	2.098.175.602.334,50	99.380.370.000.000,00	2,111
10.	Kepulauan Bangka Belitung	569.584.581.783,73	30.774.340.000.000,00	1,851

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2026)

Kontribusi pajak daerah terhadap PDRB pada Triwulan II tahun 2026 tertinggi pada Provinsi Lampung sebesar 1,935 % dan terendah pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,341 %. Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 0,341 %.

Struktur dan pola konsumsi masyarakat akan barang dan jasa di pasar produk untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau sangat tinggi sehingga kontribusi pajak daerah menjadi kecil, apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

3.1.5.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.43
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi IKSS 4

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2026	REALISASI TW II 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,62	0,341	55	Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota	Penguatan sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota
						Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB dan BBN-KB berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah	Konsolidasi Bersama Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah
						Perlambatan struktur perekonomian daerah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah	Memberikan insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investasi daerah
						Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah terutama pajak PKB	Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar patuh dalam membayar pajak daerah untuk pembangunan daerah
						Kendaraan yang beroperasi dalam menjalankan usahanya di Sumatera Selatan banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan	Kerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi lainnya
						Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah	Melakukan pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko untuk mengendalikan kebocoran penerimaan pajak daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PDRB, antara lain:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah secara bertahap terutama untuk UPTB baru;
2. Melaksanakan door to door service, penagihan pajak daerah dari satuan rumah tangga yang berkerjasama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
3. Melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak bersama dengan Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah;
4. Melaksanakan pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko;
5. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan internal sektor pajak daerah;
6. Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, TNI AL, Pol Airud terkait pengawasan peredaran penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di perairan;
7. Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuato akses data kependudukan;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;
9. Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
10. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.44
Faktor Penghambat Kinerja IKSS 4

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,62	0,341	55	2.036.800.000	49.796.600	2,44	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota 2. Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB dan BBN-KB berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah 3. Perlambatan struktur perekonomian daerah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah 4. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah terutama pajak PKB 5. Kendaraan yang beroperasi dalam menjalankan usahanya di Sumatera Selatan banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan 6. Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah 7. Belum optimalnya update data kendaraan bermotor 8. Layanan pembayaran pajak daerah belum seluruhnya menyentuh titik layanan sampai ke tingkat pedesaan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.5.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.5.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.45
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 4 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,62	0,341	55	2.106.800.000,00	17.359.600,00	0,82	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.5.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.46
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 4 Terhadap Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			94,15	0,00	0,00	2.036.800.000,00	49.796.600,00	2,44	-
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		94,15	0,00	0,00	2.036.800.000,00	49.796.600,00	2,44	-
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2.036.800.000,00	49.796.600,00	2,44	
	JUMLAH						2.036.800.000,00	49.796.600,00	2,44	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.5.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.45
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 4 Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	31,24	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	32,65	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	11,86	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	17,25	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	8,54	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	6,84	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	6,84	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	11,8	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1,31	Menunjang

				Daerah			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2,44	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	43,85	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	43,06	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8,93	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	23,24	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.6 Sasaran Strategis 5 (SS.5)

SS.5

Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

".....Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah....."

Dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk memperkuat desentralisasi fiskal daerah dari sisi penerimaan pendapatan daerah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kualitas pemerintahan daerah dengan kondisi perekonomian kembali ke azas desentralisasi, yang berarti bahwa desentralisasi merupakan reformasi dari sisi kebijakan yang harus mempertimbangkan kualitas pemerintahan daerah menyerahkan wewenang. Dengan pemberian pengaturan desentralisasi fiskal pendapatan daerah melahirkan berbagai strategi dan kebijakan pemerintahan daerah untuk menggali potensi penerimaan daerah yang dikelompokkan pada Pendapatan Asli Daerah.

Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Walaupun otonomi dalam penggalian sumber-sumber yang menjadi potensi penerimaan PAD telah diberikan pada tingkatan pemerintahan daerah, pemerintah pusat juga mengatur dan memberikan mandatori dana transfer ke daerah. Mandatori dana transfer ke daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sehingga tercapai tujuan bernegara untuk mensejahterakan masyarakat dengan indikator PDRB riil per kapita juga meningkat. Bentuk dana transfer ke daerah antara lain

dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah. Transfer dana pemerintah dalam bentuk program tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan melakukan pemantauan yang tepat untuk menangkap permasalahan di daerah dengan target pemerintah untuk mengurangi ketimpangan secara maksimal.

IKSS.5

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Formula Perhitungan IKSS.5:

$$\left(\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100 \% \right)$$

Dimana:

PAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah = Realisasi Pendapatan Daerah

3.1.6.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran data kinerja IKSS.5 tahun 2025:

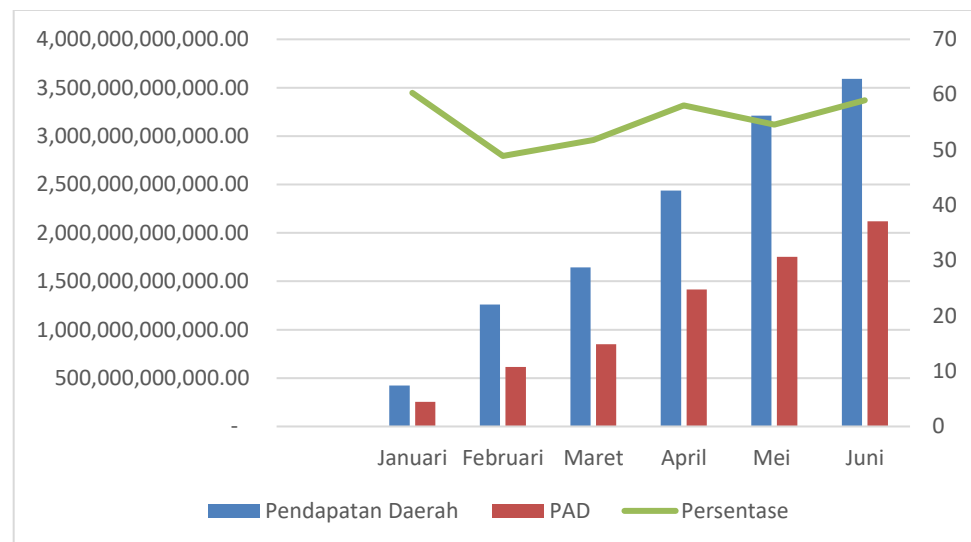
Tabel 3.48

Pengukuran Data Kinerja IKSS 5 Triwulan II Tahun 2026

No.	Bulan	Realisas TW II 2026		Persentase (%)	Target Tahunan 2026
		Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah		
1.	Januari	424.031.881.720,69	255.787.714.620,69	60,323	49,89
2.	Februari	1.258.765.484.321,08	615.693.471.321,08	48,912	
3.	Maret	1.641.969.352.535,81	850.245.439.419,81	51,782	
4.	April	2.438.696.405.405,60	1.415.781.762.667,60	58,055	
5.	Mei	3.211.026.293.912,06	1.752.394.354.924,06	54,574	
6.	Juni	3.593.065.395.928,43	2.119.766.534.740,43	58,996	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah selama Triwulan II tahun 2026 secara *month-to-month* sudah cukup baik, hal ini dibuktikan nilai realisasi kontribusi PAD mencapai 50 %, kinerja tertinggi terjadi pada bulan Juni 2026, dimana kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai 58,996 %.



Gambar 3.12
Grafik Persentase PAD Terhadap Pendaptan Daerah dalam APBD TW II 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 untuk tahun 2026 = $\frac{58,996}{49,89} \times 100 \% = 118,25 \%$

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.119.766.534.740,43 atau memberikan kontribusi sebesar 118,25 % dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.593.065.395.928,43 atau sebesar 58,996 % pada TW II ini, hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Selatan sangat membutuhkan alternatif pembiayaan lainnya (*creative financing*) antara lain Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat, investasi langsung, CSR.

3.1.6.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan II Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Triwulan II tahun 2026 ke Triwulan II tergambar pada tabel berikut:

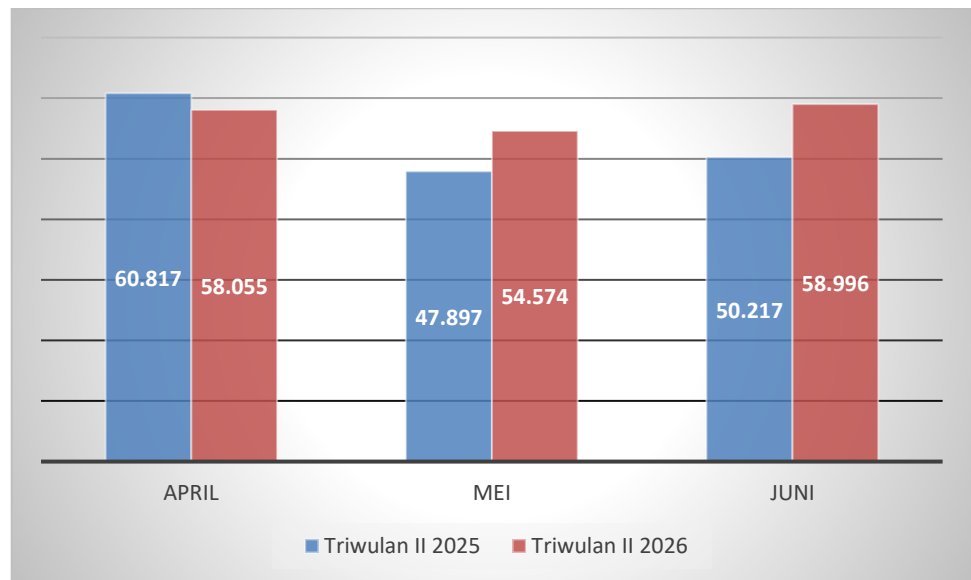
Tabel 3.49

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Periodesasi	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		
	April	Mei	Juni
Triwulan II 2025	60,817	47,897	50,217
Triwulan II 2026	58,055	54,574	58,996

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Jika dibandingkan dengan TW II tahun 2025, kontribusi PAD pada TW II tahun 2026 mengalami peningkatan 8.779 poin. Kontribusi PAD terbesar terhadap Pendapatan Daerah terjadi pada Bulan Juni tahun 2026 dengan memberikan kontribusi sebesar 58,996 %, namun kondisi ini mengalami penurunan pada Bulan Mei tahun 2026 dengan kontribusi sebesar 54,574 %, mengindikasikan bahwa dalam pembiayaan pembangunan dengan menggunakan dana APBD, Provinsi Sumatera Selatan masih mengharapkan sumber pembiayaan lainnya non APBD antara lain transfer ke daerah, investasi, CSR, KPBU dan *creative financing* lainnya.



Gambar 3.13

Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah TW II 2025 dengan TW II 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel Triwulan II 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan II 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB).

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN

- 3.1.6.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah**
 Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2026, apabila dibandingkan dengan rencana target yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.50

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 TW II Tahun 2026 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Uraian		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	
1.	2026	2.119.766.534.740,43	3.593.065.395.928,43	58,996
dst				
2.	2030	7.075.931.702.943,23	13.549.281.593.204,80	55,64

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan

Daerah pada tahun 2025-2029 = $\frac{58,996}{55,64} \times 100 \% = 106,03 \%$ **Tabel 3.51**

Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 5 TW II dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW II 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	58,996	55,64	106,03

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Capaian kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah apabila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 dan Renstra tahun 2025 – 2029 telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 106,03 %, hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian tahun 2026 sesuai dengan *on the track* dari dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Hal ini menggambarkan kondisi bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar 58,996 %, masih harus ditopang oleh sumber pembiayaan lainnya untuk pembangunan Sumatera Selatan

3.1.6.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2026 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Realisasi Triwulan II 2026		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	
1.	Aceh	0,00	0,00	0,00
2.	Sumatera Utara	2.505.634.273.676,60	5.193.945.906.120,60	48,241
3.	Sumatera Barat	1.326.656.573.146,80	3.374.644.200.687,80	39,312
4.	Riau	1.933.372.012.396,60	2.972.276.010.100,60	65,047
5.	Jambi	704.322.973.484,92	1.096.583.434.174,90	64,229
6.	Sumatera Selatan	2.119.766.534.740,43	3.593.065.395.928,43	58,996
7.	Bengkulu	397.989.015.538,68	910.662.918.773,68	43,703
8.	Lampung	1.914.068.433.395,50	2.365.666.541.706,50	80,910
9.	Kepulauan Riau	791.443.120.009,51	1.576.845.889.350,50	50,192
10.	Kepulauan Bangka Belitung	341.838.399.761,51	806.993.698.071,51	42,359

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu 2026

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah terbesar pada Provinsi Lampung sebesar 80,910 % sementara kontribusi terendah pada Provinsi Sumatera Barat sebesar 39,312 %. Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 58,996 %. Namun kondisi kontribusi PAD Sumatera Selatan diatas 50 % yang mengindikasikan bahwa masih mempunyai ketergantungan pada transfer ke daerah.

3.1.6.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.53
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 5

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2026	REALISASI TW II 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,02	58,996	235,795	Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam menggali potensi Retribusi Daerah	
						Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga	
						Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
						Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	
						Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, TNI AL, Pol Airud terkait pengawasan peredaran penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di perairan	
						Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasive	

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
3. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
4. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;
5. Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam menggali pendapatan asli daerah;
6. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
7. Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.



Tabel 3.54
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 5

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi TW II	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,02	58,996	235,795	144.000.000	13.350.000	9,27	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam menggali potensi Retribusi Daerah 2. Kerjasama kolaboratif bersama Agen Pemegang Merk Tunggal (ATPM) kendaraan bermotor 3. Kerjasama dengan Camat, Lurah dan Ketua RT setempat dalam rangka penagihan pajak daerah 4. Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor 5. Program kredit murah bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam keringanan berusaha 6. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru 7. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 8. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 9. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.6.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.6.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.55
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 5 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,02	58,996	235,795	144.000.000,00	13.350.000,00	9,27	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada Triwulan II tahun 2026 belum dihitung.

3.1.6.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.56
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 5 Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		94,15	86,71	91,79	144.000.000,00	13.350.000,00	9,27	-
	1.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	94,15	86,71	91,79	144.000.000,00	13.350.000,00	9,27	-
		1.1 Pengolahan Data Retribusi Daerah				144.000.000,00	13.350.000,00	9,27	
	JUMLAH					144.000.000,00	13.350.000,00	9,27	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah pada Triwulan II tahun 2026 belum dihitung.

3.1.6.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.57
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 5

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Daerah	235,79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	31,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	11,86	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	32,39	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	6,84	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	11,8	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1,31	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2,44	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak	26,16	Menunjang

					Daerah		
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	43,85	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	43,06	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8,93	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	2,58	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	23,24	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.7 Sasaran Strategis 6 (SS.6)

SS.6

Meningkatnya Pendapatan Daerah

".....Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat"

Pendekatan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan pendapatan daerah pertama kali diterapkan di Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disertai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Landasan kebijakan penerapan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan pendapatan daerah seiring dengan kebijakan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di daerah menuju kemandirian fiskal daerah.

Dua dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mulai tahun 2001-2020 telah memberikan gambaran perekonomian daerah serta memberikan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ke depannya. Keleluasaan dalam kewenangan pemerintahan daerah untuk menggali sumber yang menjadi potensi pendapatan asli daerah terutama yang bersumber pada pendapatan pajak daerah, penerimaan melalui retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber pendapatan pajak daerah merupakan penerimaan terbesar dari penerimaan pendapatan asli daerah, dimana dalam perekonomian pajak memiliki peranan sebagai sumber penerimaan daerah dan juga sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dengan insentif fiskal daerah melalui pengurangan tarif pajak sehingga merangsang pertumbuhan investasi daerah.

Formula Perhitungan IKSS.6:

$$y = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n}{\text{Target PAD Tahun } n} \times 100 \%$$

Dimana:

y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD

Realisasi PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

Target PAD = Target PAD Tahun ke n yang ditetapkan dalam APBD

3.1.7.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026. Pengukuran data kinerja IKSS.6 Triwulan II tahun 2026:

Tabel 3.58
Pengukuran Data Kinerja IKSS 6 Triwulan II Tahun 2026

No.	Bulan	Pendapatan Asli Daerah		Persentase (%)	Target Tahunan 2026
		Realisasi	Target		
1.	Januari	255.787.714.620,69	5.132.383.464.643,00	4,984	92,21
2.	Februari	615.693.471.321,08	5.132.383.464.643,00	11,996	
3.	Maret	850.245.439.419,81	5.132.383.464.643,00	16,566	
4.	April	1.415.781.762.667,60	5.132.383.464.643,00	27,585	
5.	Mei	1.752.394.354.924,06	5.132.383.464.643,00	34,144	
6.	Juni	2.119.766.534.740,43	5.132.383.464.643,00	41,302	

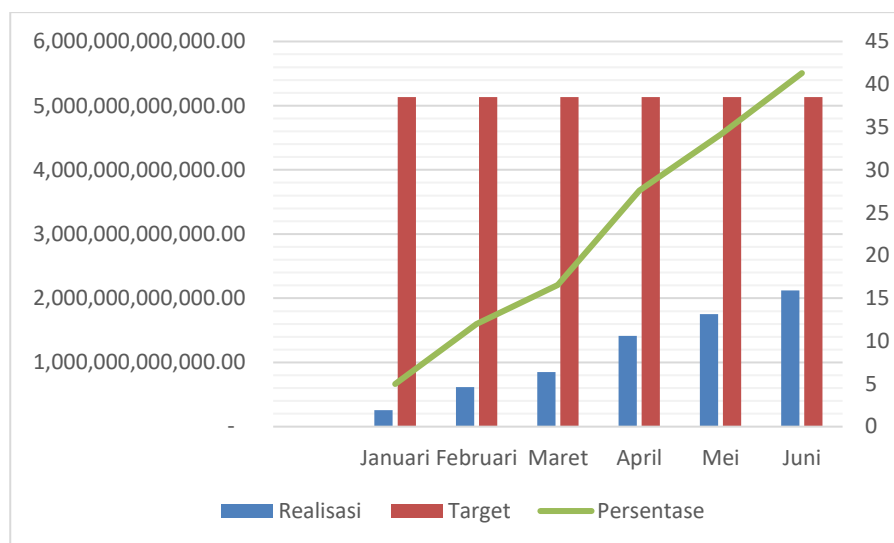
Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Realisasi pengukuran data kinerja pencapaian PAD terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 secara month-to-month mengalami kenaikan.

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{41,302}{92,21} \times 100 \% = 44,79 \%$$

Realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah Triwulan II tahun 2026 mencapai nilai Rp. 2.119.766.534.740,43 atau terealisasi sebesar 44,79 % dari rencana target sebesar Rp. 5.132.383.464.643,00 hal ini mengindikasikan bahwa kinerja masih harus ditingkatkan lagi dengan realisasi uang masih dibawah 50 persen dengan menggali sumber potensi yang

menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan karakteristik daerah.



Gambar 3.14
Grafik Realisasi Pencapaian PAD Terhadap target APBD TW II 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

3.1.7.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 serta Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

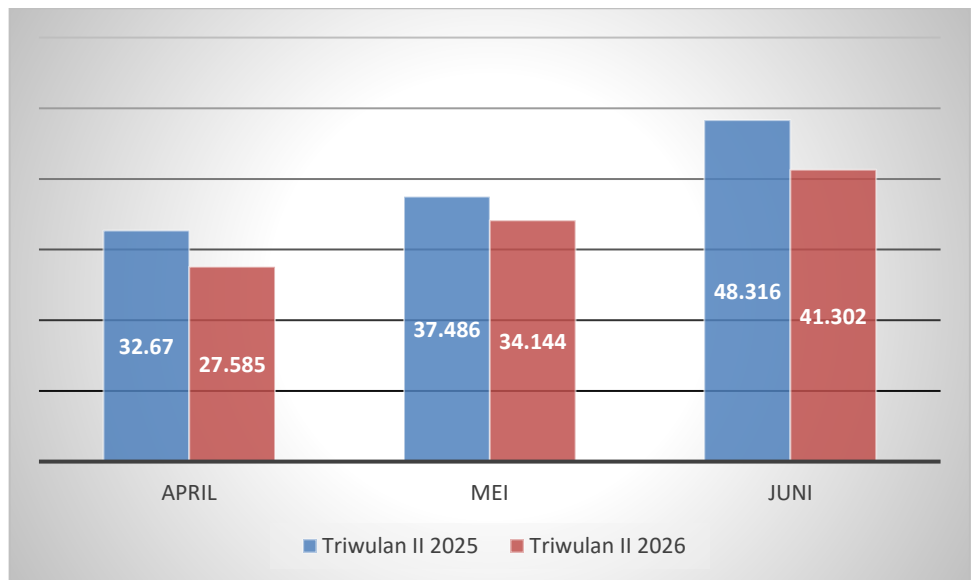
Realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target Triwulan II tahun 2026 ke Triwulan II tahun 2025

Tabel 3.59
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 6 TW II Tahun 2026 dengan TW II Tahun 2025

Periodesasi	Persentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah terhadap Target		
	April	Mei	Juni
Triwulan II 2025	32,670	37,486	48,316
Triwulan II 2026	27,585	34,144	41,302

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Realisasi capaian kinerja pencapaian PAD terhadap target Bulan Juni tahun 2026 mencapai 41,302. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada Bulan Maret tahun 2026 sebesar 44,79 %, namun kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Bulan Juni 2025 sebanyak 7,014 poin.



Gambar 3.15
Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah TW II 2025 dengan TW II 2026
 Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel Triwulan II 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan II 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB).

3.1.7.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja pencapaian PAD Triwulan II tahun 2026 dengan rencana target di dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.60

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 6 Triwulan II Tahun 2026 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Persentase (%)
		Realisasi	Target	
1.	2026	2.119.766.534.740,43	5.132.383.464.643,00	41,302
	dst			
2.	2030			N/A

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Capaian realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target PAD dalam RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan pada akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.61

Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 6 TW II Tahun 2026 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW II 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
7.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41,302	N/A	N/A

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

3.1.7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target tahun 2026 apabila dibandingkan dengan pencapaian 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.62

Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 6 TW II Tahun 2026 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Pendapatan Asli Daerah Triwulan II 2026		Persentase (%)
		Realisasi	Target	
1.	Aceh	0,00	0,00	0,00
2.	Sumatera Utara	2.505.634.273.676,60	6.967.065.771.493,00	35,964
3.	Sumatera Barat	1.326.656.573.146,80	3.512.798.562.828,00	37,766
4.	Riau	1.933.372.012.396,60	5.240.334.064.481,00	36,894
5.	Jambi	704.322.973.484,92	1.945.387.781.796,00	36,205

6.	Sumatera Selatan	2.119.766.534.740,43	5.132.383.462.643,00	41,302
7.	Bengkulu	397.989.015.538,68	1.254.994.442.537,00	31,712
8.	Lampung	1.914.068.433.395,50	4.025.032.820.130,00	47,554
9.	Kepulauan Riau	791.443.120.009,51	1.844.251.902.410,00	42,914
10.	Kepulauan Bangka Belitung	341.838.399.761,51	833.309.933.245,62	41,022

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu Sumsel 2026

Realisasi capaian kinerja PAD terhadap target pada Triwulan II tahun 2026 tertinggi berada pada Provinsi Lampung sebesar 47,554 % dan terendah pada Provinsi Bengkulu sebesar 31,712 %. Posisi Provinsi Sumatera Selatan berada pada urutan ke tiga sebesar 41,302 % setelah Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.7.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.63

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 6

O.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2026	REALISASI TW II 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25	41,302	165,208	Melakukan update pendataan wajib pajak untuk memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat	
						Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah	
						Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target kinerja yang memiliki realisasi kinerja terendah antara lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya	
						Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) secara gabungan dengan stakeholder terkait dan secara berkala waktu	
						<i>Cascading</i> pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi PAD, antara lain:

1. Melaksanakan program intensifikasi pajak daerah, dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah;
2. Memperluas ekstensifikasi pajak daerah dengan penambahan objek pajak baru melalui kerjasama investasi daerah dengan Perangkat Daerah DMPTSP;
3. Meningkatkan deversifikasi pajak daerah dengan konsolidasi fiskal Pemerintah Pusat;
4. Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
7. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Tabel 3.64
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Anggaran	Realisasi TW II	%	
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25	41,302	165,208	102.000.000	4.772.600	4,68	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP 3. Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi 4. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal 5. Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) secara gabungan dengan stakeholder terkait dan secara berkala waktu 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.7.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.7.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.65

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 6 TW II Tahun 2026 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	25	41,302	165,208	102.000.000,00	4.772.600	4,68	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan II tahun 2026 belum dihitung.

3.1.7.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.66
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 6 TW II Tahun 2026 Terhadap Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		94,15	0,00	0,00	102.000.000,00	4.772.600	4,68	-
	1.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	94,15	0,00	0,00	102.000.000,00	4.772.600	4,68	-
		1.1 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				102.000.000,00	4.772.600	4,68	
	JUMLAH					102.000.000,00	4.772.600	4,68	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dihitung.

3.1.7.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.67
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 6

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	165,208	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	31,24	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	32,65	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	11,86	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	17,25	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	8,54	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	6,84	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	6,84	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	11,8	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1,31	Menunjang

				Daerah			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2,44	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	43,85	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	43,06	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8,93	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	23,24	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

3.1.8 Sasaran Strategis 7 (SS.7)

SS.7

Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB

".....Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah"

Pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk menciptakan nilai tambah suatu produk pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik daerah timbul sebagai akibat adanya berbagai aktivitas perekonomian periode tertentu tanpa mempertimbangkan faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen (BPS Indonesia;2024). Dari sisi lapangan usaha, PDRB merupakan akumulasi dari seluruh komponen pembentuk nilai tambah bruto yang mampu dihasilkan oleh setiap lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income).

Adapun indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Non Migas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengukur kinerja kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Formula Perhitungan IKSS.7:

$$Rasio = \frac{Realisasi\ PAD}{Realisasi\ PDRB\ Non\ Migas} \times 100\ %$$

Dimana:

PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

PDRB = Realisasi PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas

3.1.8.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Pengukuran data kinerja IKSS.7 tahun 2026:

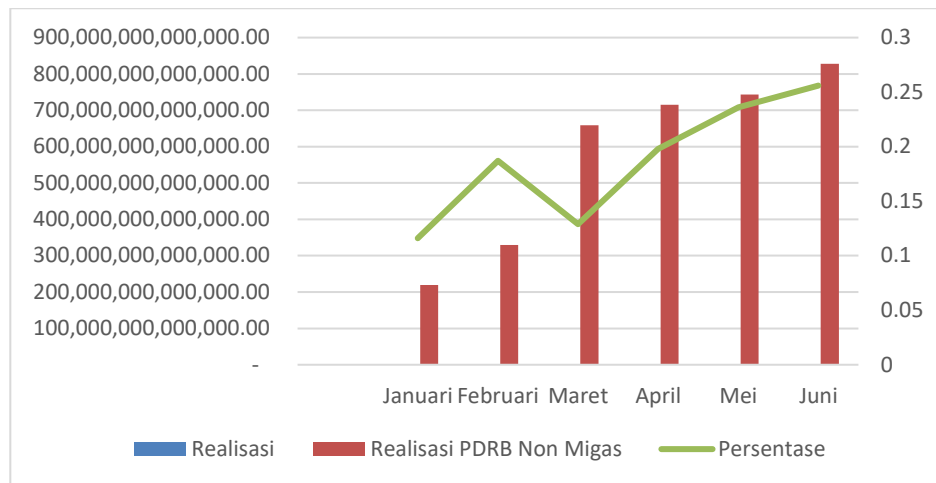
Tabel 3.67
Pengukuran Data Kinerja IKSS 7 TW II Tahun 2026

No.	Bulan	Uraian		Persentase (%)	Target Tahunan 2026
		Realisasi PAD	Realisasi PDRB Non Migas		
1.	Januari	255.787.714.620,69	219.617.553.333.333,00	0,116	0,98
2.	Februari	615.693.471.321,08	329.426.330.000.000,00	0,187	
3.	Maret	850.245.439.419,81	658.852.660.000.000,00	0,129	
4.	April	1.415.781.762.667,60	715.189.740.000.000,00	0,198	
5.	Mei	1.752.394.354.924,06	743.358.280.000.000,00	0,236	
6.	Juni	2.119.766.534.740,00	827.836.900.000.000,00	0,256	

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Realisasi kinerja IKSS.7 Trwulan II tahun 2026 secara *month-to-month* menunjukkan kenaikan yang masih bertahap mengindikasikan kinerja positif kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas dengan realisasi sebesar :

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{0,256}{0,98} \times 100\ % = 26,122\ %.$$



Gambar 3.16
Grafik Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas Terhadap PAD TW II 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Capaian kontribusi PAD terhadap PDRB sektor riil mencapai 0,256 %, hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap PDRB lapangan usaha Triwulan II masih relatif kecil. Sektor riil yang perlu dilakukan stimulus dari insentif pajak daerah yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor *home industry*

3.1.8.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan II tahun 2025

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas Triwulan II tahun 2026 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun Triwulan II tahun 2025:

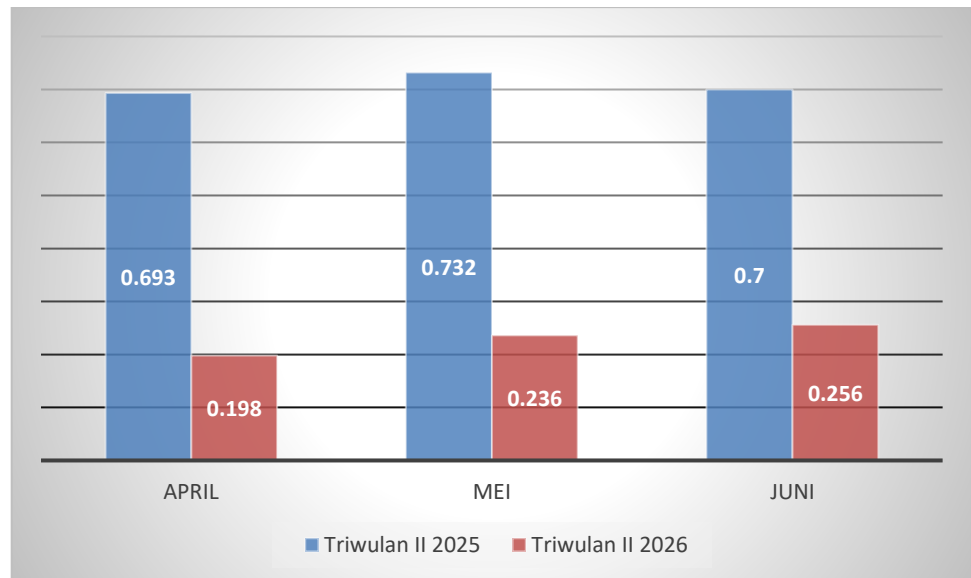
Tabel 3.69
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 TW II Tahun 2026 dengan TW II Tahun 2025

Periodesasi	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas		
	April	Mei	Juni
Triwulan II 2025	0,693	0,732	0,700
Triwulan II 2026	0,198	0,236	0,256

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas secara *month-to-month* terbesar terjadi pada Bulan Maret tahun

2026 sebesar 0,256 % dan kontribusi terendah pada Bulan Januari tahun 2026 sebesar 0,198 %.



Gambar 3.17

Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap PDRB Non Migas TW II 2026 dengan TW II 2025
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel dan BPS Sumsel

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel Triwulan II 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan II 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB), hal ini juga mempengaruhi penerimaan PDRB Sumsel.

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN

- 3.1.8.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
- Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 3.70
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Uraian		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB Non Migas	
1.	2026	2.119.766.534.740,00	658.852.660.000.000,00	0,256
dst				
2.	2030			N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Capaian kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas terhadap rencana jangka menengah RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan sampai akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.71
Capaian Data Kinerja IKSS 7 Tahun 2026 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW II 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,256	N/A	N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

- 3.1.8.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
- Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.72
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Realisasi Triwulan II Tahun 2026		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB Non Migas	
1.	Aceh	0,00	0,00	0,00
2.	Sumatera Utara	2.505.634.273.676,60	320.029.180.000.000,00	0,783
3.	Sumatera Barat	1.326.656.573.146,80	92.962.820.000.000,00	1,427
4.	Riau	1.933.372.012.396,60	317.136.360.000.000,00	0,610
5.	Jambi	704.322.973.484,92	88.803.210.000.000,00	0,793
6.	Sumatera Selatan	2.119.766.534.740,43	827.863.900.000.000,00	0,256
7.	Bengkulu	397.989.015.538,68	28.636.840.000.000,00	1,390
8.	Lampung	1.914.068.433.395,50	132.361.940.000.000,00	1,446
9.	Kepulauan Riau	791.443.120.009,51	99.380.370.000.000,00	0,796
10.	Kepulauan Bangka Belitung	341.838.399.761,51	30.774.340.000.000,00	1,111

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2026)

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas terbesar pada Provinsi Lampung dengan nilai sebesar 1,446 %, sementara kontribusi terkecil pada Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai sebesar 0,256 %, sementara Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 0,256 %.

3.1.8.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.73
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 7

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2026	REALISASI TW II 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,4	0,256	64	Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan yang menyebabkan PDRB riil per kapita mengalami perlambatan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru	Diperlukan menciptakan peluang investasi daerah mendorong investor dengan memberikan insentif fiskal daerah
						Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan	Diperlukan Kerjasama dengan BUMDes atau Koperasi Merah Putih atau Posko Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan sampai ke wilayah pedesaan
						Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Mengadakan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Bersama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota
						Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal	Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian atas kecurangan terhadap kebocoran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
						Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak daerah belum optimal	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat secara massif dan berkala waktu
						Belum optimalnya pelaksanaan atas rekomendasi dari KPK	Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026



Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap PDRB Lapangan Usaha Non Migas, antara lain:

1. Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
2. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
4. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
5. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;
6. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.

Tabel 3.74
Faktor Penghambat Kinerja IKSS 7

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,4	0,256	64	548.800.000	61.378.300	11,18	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat secara intensif (kolaboratif) memberikan pengaruh terhadap penyaluran dana transfer pusat bisa terealisasi 3. Penyaluran dana bagi hasil pemerintah pusat dengan system <i>treasury deposit facility</i> cukup efisien <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan yang menyebabkan PDRB riil per kapita mengalami perlambatan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru 2. Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan 3. Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal 5. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak daerah belum optimal 6. Belum optimalnya penggalan sumber potensi yang menjadi penerimaan Retribusi Daerah 7. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB memerlukan kebijakan equivalen dengan pembayaran pajak sesuai UU 28/2009 8. Belum optimalnya sinergi Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD) perairan dan daratan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

3.1.8.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.8.1.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.75

Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 7 Tahun 2026 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	0,4	0,256	64	548.800.000,00	61.378.300	11,18	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas pada Triwulan II tahun 2026 belum dapat dihitung.

3.1.8.1.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.76
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 7 TW II Tahun 2026 Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
II.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		94,15	1,83	1,94	548.800.000,00	61.378.300	11,18	-
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	94,15	1,83	1,94	548.800.000,00	61.378.300	11,18	-
		1.1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				548.800.000,00	61.378.300	11,18	
	JUMLAH					548.800.000,00	61.378.300	11,18	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Triwulan II tahun 2026 belum dapat dihitung.

3.1.8.1.8 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.77

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan IKSS 7 TW II Tahun 2026

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	64	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	31,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	32,65	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	32,39	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	11,8	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1,31	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	26,16	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,	43,85	Menunjang

				Pajak Daerah	dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	43,06	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8,93	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	2,58	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	23,34	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Formula Perhitungan IKSS.8:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi PDRB PKPD}}$$

Dimana:

PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

PDRB PKPD = PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu wilayah adalah dengan melakukan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan salah satunya berdasarkan pengeluaran/expenditure konsumsi akhir pemerintah daerah provinsi. Hal ini untuk menunjukkan kinerja pendapatan asli daerah untuk digunakan dalam belanja yang bersifat konstruktif mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketepatan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghasilkan konsumsi pengeluaran pemerintah yang semakin berkualitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya pola opsen PKB dan opsen BBNKB diharapkan menjadi sumber kekuatan pajak daerah yang berdasarkan basis data pajak daerah berdasarkan domisili penduduk. Penguatan basis data pajak daerah ini diharapkan mampu mendorong kemandirian daerah dalam menggali potensi pajak daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.

3.1.8.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026. Pengukuran data kinerja IKSS.8 Triwulan II tahun 2026:

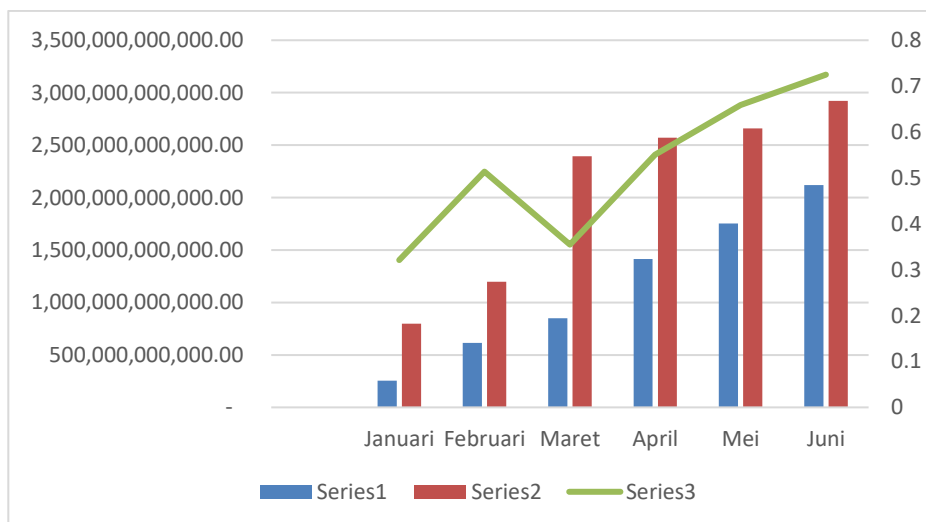
Tabel 3.78
Pengukuran Data Kinerja IKSS 8 TW II Tahun 2026

No.	Bulan	Uraian		Rasio	Target Tahunan 2026
		Realisasi PAD	Realisasi PDRB PKPD		
1.	Januari	255.787.714.620,69	797.887.592.592,59	0,321	1,18
2.	Februari	615.693.471.321,08	1.196.831.388.888,89	0,514	
3.	Maret	850.245.439.419,81	2.393.662.777.777,78	0,355	
4.	April	1.415.781.762.667,60	2.570.126.851.851,85	0,551	
5.	Mei	1.752.394.354.924,06	2.658.358.888.888,89	0,659	
6.	Juni	2.119.766.534.740,43	2.923.055.000.000,00	0,725	

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah secara *month-to-month* tahun 2026 tertinggi terjadi pada Bulan Juni 2026 sebesar 0,725 % dan terendah terjadi pada Bulan Januari 2026 sebesar 0,321 %.

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{0,725}{1,18} \times 100 \% = 61,44 \%$$



Gambar 3.18
Grafik Deviasi Realisasi PAD Terhadap PAD dalam APBD 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Capaian kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah pada Triwulan II tahun 2026 mencapai 0,725

%, hal ini mengindikasikan bahwa tagging pendapatan yang menjadi proxy belanja pengeluaran pemerintah daerah yang selanjutnya dikonsumsi masyarakat dengan membeli produk barang dan jasa masih sangat kecil dengan nilai 0,725 %.

Peran dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pembentuk perekonomian daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto yang menjadi proxy pengeluaran belanja pemerintah daerah yang menghasilkan produk barang dan jasa di masyarakat. Selama periode tahun 2010 – 2025, perkembangan kontribusi PAD terhadap PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif.

3.1.8.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan II Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja Triwulan II tahun 2026:

Tabel 3.79

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 8 TW II Tahun 2026 dengan TW II Tahun 2026

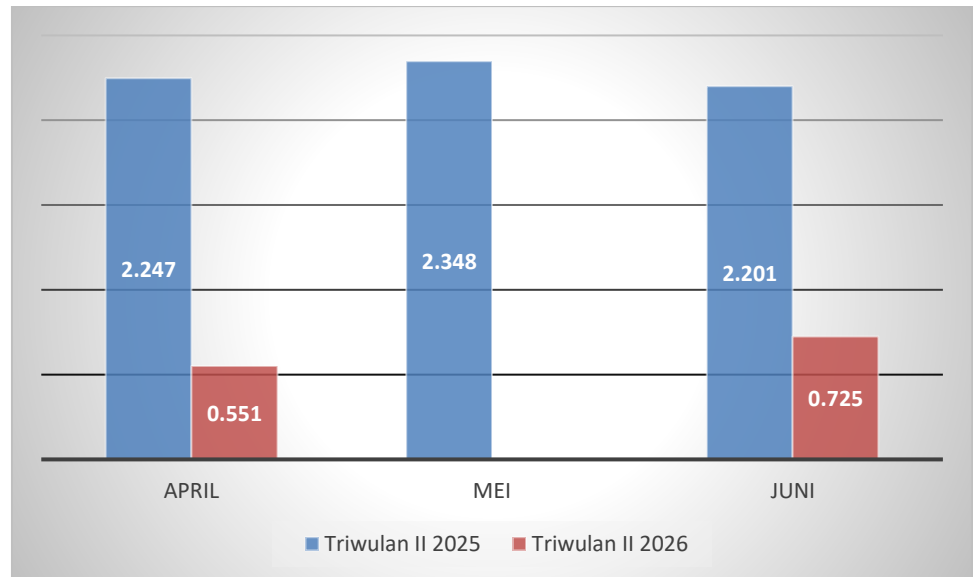
Periodesasi	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah		
	April	Mei	Juni
Triwulan II 2025	2,247	2,348	2,201
Triwulan II 2026	0,551	0.659	0,725

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah tertinggi terjadi pada Bulan Juni 2026 sebesar 0,725 dan terendah terjadi pada Bulan Januari 2026 sebesar 0,321.

Belanja daerah (*government expenditure*) dalam bentuk belanja program, kegiatan serta sub kegiatan merupakan semua kewajiban entitas Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran berjalan. Belanja program, kegiatan serta sub kegiatan tersebut disusun berdasarkan skala prioritas daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran (*budget constraint*), misalnya belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.



Gambar 3.19

Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap PDRB PKP TW I 2026 dengan TW II Tahun 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel Triwulan II 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan II 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS – Iran secara tidak langsung (*indirect consumption*) mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB), hal ini juga berpengaruh terhadap penerimaan PDRB Sumsel.

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingga pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebutuhan APBN

3.1.8.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029

Tabel 3.80

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 8 Tahun TW II 2026 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian TW II 2026	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,725	N/A	N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Capaian kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah terhadap rencana jangka menengah RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan sampai akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.81

Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 TW II Tahun 2026 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Uraian		Rasio
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB PKPD	
1.	2026	2.119.766.534.740,43	2.393.662.777.777,78	0,725
dst				
2.	2030			N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

3.1.8.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.82
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 Tahun 2026 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Realisasi Triwulan II Tahun 2026		Rasio
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB PKPD	
1.	Aceh	0,00	0,00	0,00
2.	Sumatera Utara	2.505.634.273.676,60	506.709.696.970,00	4,945
3.	Sumatera Barat	1.326.656.573.146,80	406.644.210.526,00	3,262
4.	Riau	1.933.372.012.396,60	829.536.666.667,00	2,331
5.	Jambi	704.322.973.484,92	358.800.000.000,00	1.963
6.	Sumatera Selatan	2.119.766.534.740,43	2.923.055.000.000,00	0,725
7.	Bengkulu	397.989.015.538,68	484.324.000.000,00	0,822
8.	Lampung	1.914.068.433.395,50	507.384.666.667,00	3,772
9.	Kepulauan Riau	791.443.120.009,51	537.171.428.571,00	1,473
10.	Kepulauan Bangka Belitung	341.838.399.761,51	319.735.714.286,00	1,069

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2026)

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah tertinggi pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,945, terendah pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,725, sementara Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 0,725.

3.1.8.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.83
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 8

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2026	REALISASI TW II 2026	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,12	0,355	295,83	Memberikan program keringanan tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif berupa tarif Rp. 0	
						Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal	
						Penempelan stiker tanda lunas di kendaraan bermotor sebagai inovasi pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak	
						Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan	
						Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor	
						Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB, Opsen BBN-KB serta Opsen MBLB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan door to door service	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
2. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
4. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
5. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;
6. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.

Tabel 3.84
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 8

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2026			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,12	0,355	295,83	342.700.000	4.500.000	1,31	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 4. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap 2. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 3. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 4. Kolaboratif bersama dengan pihak Kepolisian dalam penertiban kendaraan bermotor 5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah 6. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

3.1.8.2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.8.2.5.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.85

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 8 TW I Tahun 20256 Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	0,12	0,355	295,83	342.700.000,00	4.500.000	1,31	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah pada Triwulan II tahun 2026 belum dapat dihitung.

3.1.1.1.1 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.86
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 8 TW II Tahun 2026 Terhadap Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
II.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			94,15	1,83	1,94	342.700.000,00	4.500.000	1,31	-
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		94,15	1,83	1,94	342.700.000,00	4.500.000	1,31	-
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				342.700.000,00	4.500.000	1,31	
	JUMLAH						342.700.000,00	4.500.000	1,31	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Triwulan II tahun 2026 belum dapat dihitung.

3.1.8.2.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.87
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 8

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	295,83	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	32,24	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	32,65	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	11,86	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	17,25	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	32,39	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	8,54	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	6,84	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	6,84	Menunjang
				Perencanaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	11,8	Menunjang

				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1,31	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2,44	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	26,16	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	22,02	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	43,06	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8,93	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	2,58	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	0,00	Menunjang

				Daerah			
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	23,24	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

